



KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

LKJIP

**Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN**



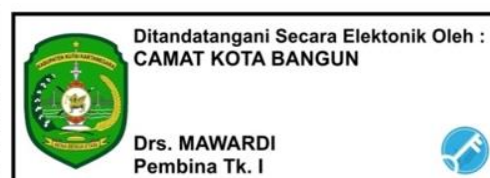
KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kota Bangun Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kecamatan Kota Bangun Tahun 2023, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kecamatan Kota Bangun disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kota Bangun Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Kota Bangun Tahun 2023 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Kota Bangun kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kota Bangun, 14 Februari 2024



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN KOTA BANGUN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kota Bangun berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis suatu organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur dan dapat diujikan diandalkan.

Berdasarkan saran dan arahan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Suatu indikator kinerja tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan tersebut sebagai suatu perkiraan. Dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran yang tetap, melainkan indikasi dari keadaan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan dijadikan sebagai alat ukur. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Kota Bangun Tahun 2023.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF.....
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR GRAFIK.....
BAB I PENDAHULUAN
 A. Latar Belakang
 B. Gambaran Umum.....
 C. Struktur Organisasi
 D. Tugas Pokok dan Fungsi
 E. Sumber Daya Aparatur
 F. Sumber Daya Keuangan.....
 G. Isu-isu Strategis
 H. Sistematika Laporan Kinerja.....
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA.....
 A. Perencanaan Kinerja.....
 1. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah
 2. Tujuan dan Sasaran.....
 3. Strategi.....
 4. Arah Kebijakan.....
 5. Program
 B. Perjanjian Kinerja
 C. Alokasi Anggaran Tahun 2023
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....
 A. Capaian Kinerja.....
 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja
 Sebelumnya.....
 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target
 Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis
 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan
 Kinerja serta Alternative Solusi.....
 5. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran
 Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....

B. Perbaikan Kedepan.....

LAMPIRAN



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Desa/Kelurahan Di Kecamatan Kota Bangun	1
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Kota Bangun Tahun 2023	2
Tabel 1.3	Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan	3
Tabel 1.4	Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan	1
Tabel 2.1	Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	2
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan	3
Tabel 2.3	Keselaran Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2023	1
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	2
Tabel 2.5	Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026	3
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran Kecamatan Kota Bangun Tahun 2023	1
Tabel 2.7	Alokasi Anggaran Jenis Belanja Kecamatan Kota Bangun Tahun 2023	2
Tabel 2.8	Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	3
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	1
Tabel 3.2	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2023	2
Tabel 3.3	Analisa Hasil Survey	3
Tabel 3.4	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023	1
Tabel 3.5	Pendapatan Asli Desa Di Wilayah Kecamatan Kota Bangun Tahun 2023	2
Tabel 3.6	Daftar Wajib LHKASN Kecamatan Kota Bangun Tahun 2023	3
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya	1
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi	2



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.9	Perbandingan Antara Target Renstra dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023	3
Tabel 3.10	Faktor Pendukung Dan Penghambat Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023	1
Tabel 3.11	Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023	2
Tabel 3.12	Analisis Program Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023	3
Tabel 3.13	Laporan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Kota Bangun Bulan Januari s/d Desember 2023	1
Tabel 3.14	Daftar Realisasi APBDes Tahun 2023 Per 30 Desember 2023	2
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan Tahun 2023 Kecamatan Kota Bangun	3
Tabel 3.16	Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan Tahun 2022 Kecamatan Kota Bangun	1



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Luas Wilayah Desa/Kelurahan Di Kecamatan Kota Bangun	1
Gambar 1.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022	2
Gambar 1.1	Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan	3
Gambar 1.1	Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan	1
Gambar 1.1	Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	2
Gambar 1.1	Strategi dan Arah Kebijakan	3
Gambar 1.1	Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2022	1



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Luas Wilayah Desa/Kelurahan Di Kecamatan Kota Bangun	1
Grafik 1.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022	2
Grafik 1.3	Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan	3
Grafik 1.4	Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan	1
Grafik 2.1	Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	2
Grafik 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan	3
Grafik 2.3	Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2023	1
Grafik 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	2
Grafik 2.5	Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026	3
Grafik 2.6	Alokasi Anggaran Kecamatan Kota Bangun Tahun 2023	1
Grafik 2.7	Alokasi Anggaran Jenis Belanja Kecamatan Kota Bangun Tahun 2023	2
Grafik 2.8	Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	3
Grafik 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	1
Grafik 3.2	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2022	2
Grafik 3.3	Analisa Hasil Survey	3
Grafik 3.4	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023	1
Grafik 3.5	Pendapatan Asli Desa Di Wilayah Kecamatan Kota Bangun Tahun 2023	2
Grafik 3.6	Daftar Wajib LHKASN Kecamatan Kota Bangun Tahun 2023	3
Grafik 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2023dan Realisasi Kinerja Sebelumnya	1
Grafik 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	2



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

Grafik 3.9	Perbandingan Antara Target Renstra dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023	3
Grafik 3.10	Faktor Pendukung Dan Penghambat Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023	1
Grafik 3.11	Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023	2
Grafik 3.12	Analisis Program Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023	3
Grafik 3.13	Laporan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Kota Bangun Bulan Januari s/d Desember 2023	1
Grafik 3.14	Daftar Realisasi APBDes Tahun 2023 Per 30 Desember 2023	2
Grafik 3.15	Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan Tahun 2023 Kecamatan Kota Bangun	3
Grafik 3.16	Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan Tahun 2022 Kecamatan Kota Bangun	1



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Rangkaian sistemik tersebut meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta review dan evaluasi kinerja.

Kecamatan Kota Bangun dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun:

1. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kota Bangun Tahun 2021-2026;
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kota Bangun Tahun 2023;
3. Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kota Bangun Tahun 2023; dan
4. Perjanjian Kinerja (PK) Camat Kota Bangun Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi perangkat daerah diwajibkan menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN KOTA BANGUN

memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kota Bangun Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Kota Bangun
2. Mendorong Kecamatan Kota Bangun di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Kota Bangun untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Kota Bangun di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

1.2. Gambaran Umum

Kecamatan Kota Bangun merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis, Kecamatan Kota Bangun terletak antara 116°27'–116°46' Bujur Timur dan 0°07'–0°36' Lintang Selatan dengan luas wilayah mencapai 897,9 km². Secara administratif, Kecamatan Kota Bangun berbatasan dengan:

Sebelah utara : Kecamatan Muara Kaman dan Kecamatan Kenohan
Sebelah timur : Kabupaten Muara Kaman dan Kecamatan Sebulu
Sebelah selatan : Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Kenohan
Sebelah barat : Kecamatan Muara Wis

Wilayah Kecamatan Kota Bangun terdiri dari 11 desa, diantaranya Desa Kota Bangun Ulu, Desa Loleng, Desa Liang Ilir, Desa Kota Bangun Ilir, Desa Pela, Desa Muhuran, Desa Kota Bangun Seberang, Desa Kedang Murung, Desa Liang Ulu, Desa Sebelimbingan, dan Desa Sangkuliman. Adapun ibukota kecamatan terletak di Desa Kota Bangun Ulu.

Dari kesebelas desa tersebut, Desa Sebelimbingan merupakan desa yang letaknya paling jauh dari ibukota Kecamatan, yaitu 34 kilometer, sedangkan Desa Kota Bangun Seberang merupakan desa yang letaknya paling dekat dari ibukota Kecamatan, yaitu 2 kilometer. Pada umumnya, semua desa



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

yang ada di Kecamatan Kota Bangun dapat ditempuh melalui jalan darat maupun jalan sungai.

Sebagian wilayah di Kecamatan Kota Bangun dialiri beberapa Sungai seperti Sungai Mahakam, Kedang Murung, Belayan dan Pela serta terdapat pula Danau Kedang Murung, Hakang, dan Semayang sehingga pola penyebaran penduduknya terkonsentrasi di sepanjang Sungai dan danau.

Berdasarkan letak geografisnya, Kecamatan Kota Bangun beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan per bulannya 153 mm dan rata-rata hari hujan berkisar 13 hari per bulan di tahun 2021. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu sebanyak 433 mm dengan 28 hari hujan selama sebulan, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan September yaitu sebanyak 57 mm dengan 10 hari hujan selama sebulan.

Gambar 1.1. Peta Wilayah Administratif Kecamatan Kota Bangun



Dengan luas wilayah desa/ kelurahan di Kecamatan Kota Bangun sebagai berikut:

Tabel 1.1. Luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Kota Bangun

Desa / Kelurahan	Luas (Km ²)	Persentase	Ket.
Kota Bangun Ulu	11	1,23	Desa
Loleng	143	15,93	Desa
Liang	48	5,35	Desa
Kota Bangun Ilir	4	0,45	Desa



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

Pela	27	3,01	Desa
Muhuran	55	6,13	Desa
Kota Bangun Seberang	33	3,68	Desa
Kedang Murung	24	2,67	Desa
Liang Ulu	9	1,00	Desa
Sebelimbingan	49	5,46	Desa
Sangkuliman	14	1,56	Desa
Jumlah	897,9	100,00	

Sumber Data: Seksi Pemerintahan Kecamatan Kota Bangun

Sasaran utama pembangunan nasional secara umum, dan Kecamatan Kota Bangun secara khusus adalah menyangkut kesejahteraan rakyat sebagaimana telah dicanangkan dalam setiap program pemerintah.

Oleh sebab itu, data mengenai kependudukan sangatlah diperlukan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan. Penduduk Kecamatan Kota Bangun pada tahun 2023 tercatat sebanyak 37.554 orang yang terdiri dari 19.584 laki-laki (52%) dan 17.970 perempuan (48%) yang tersebar di 11 desa. Data jumlah penduduk ini merupakan hasil registrasi penduduk yang dilakukan oleh aparat desa diperoleh dari administrasi kependudukan yang ada pada desa yang bersangkutan.

Secara umum persebaran penduduk di Kecamatan Kota Bangun dapat dikatakan tidak merata. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Desa Kota Bangun Ulu yang merupakan ibu kota kecamatan dengan jumlah penduduk mencapai 6.084 orang (24.77%), kemudian di Desa Kota Bangun Ilir dengan jumlah penduduk sebanyak 3.128 orang (12.74%), sedangkan yang paling sedikit penduduknya adalah Desa Sebelimbingan dengan jumlah penduduk sebanyak 571 orang (2.32%).

Adapun persebaran jumlah penduduk Kecamatan Kota Bangun per desa yaitu:

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Kota Bangun Tahun 2023

Desa / Kelurahan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
Kota Bangun Ulu	3101	2983	6.084
Loleng	1252	1189	2441
Liang	1351	1255	2.606
Kota Bangun Ilir	1.635	1.493	3.128
Pela	320	274	594



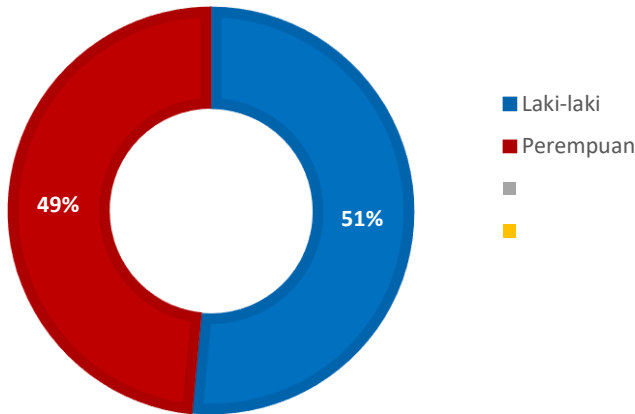
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

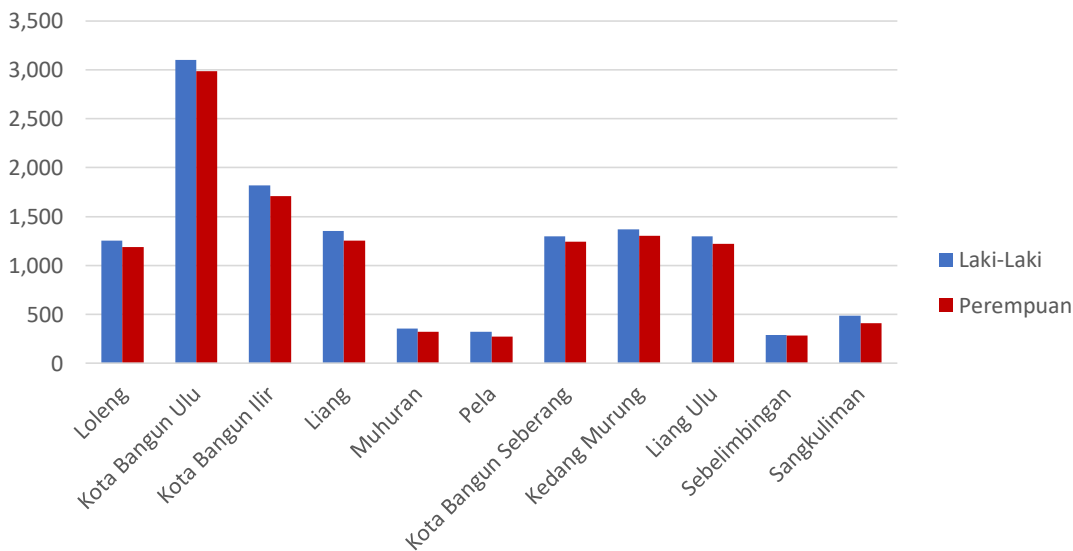
Muhuran	354	322	676
Kota Bangun Seberang	1299	1244	2.543
Kedang Murung	1368	1305	2.673
Liang Ulu	1298	1223	2.521
Sebelimbingan	288	283	571
Sangkuliman	485	405	890
Jumlah Penduduk Tahun 2023	12.647	11.914	24.561

Sumber Data: SIAK Kecamatan Kota Bangun

Grafik 1.1 Persentase Penduduk Kecamatan Kota Bangun Menurut Jenis Kelamin, 2023

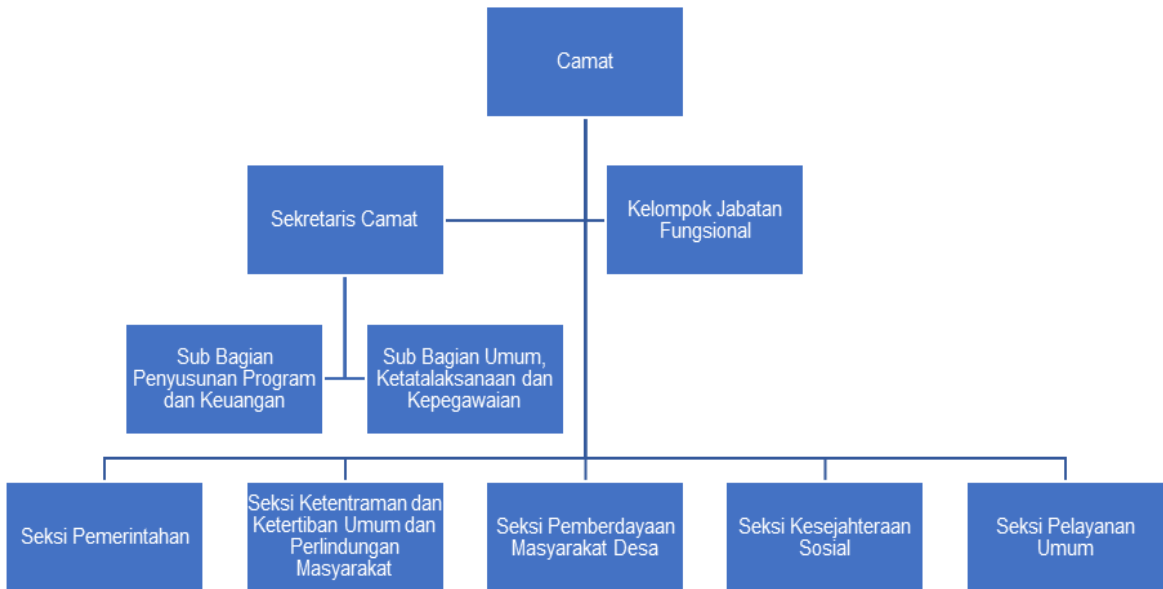


Grafik 1.2 Penduduk Kecamatan Kota Bangun Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin, 2023





Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Kecamatan Kota Bangun
Kabupaten Kutai Kartanegara



Pembentukan Kecamatan Kota Bangun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan struktur organisasi diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat; Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perangkat kecamatan terdiri dari:

- 1. Sekretariat,
 - a) Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- 2. Seksi Pemerintahan;
- 3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN KOTA BANGUN

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Umum;
7. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Adapun tugas pokok dari Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun yaitu :

1. Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Fungsi Utama

Fungsi dari Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun yaitu :

- a) Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data baserta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b) Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
- c) Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
- d) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan;
- g) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- i) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

- j) Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
- k) Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan, pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan
- l) Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan serta Lembaga Kemasyarakatan

1.4. Sumber Daya Aparatur

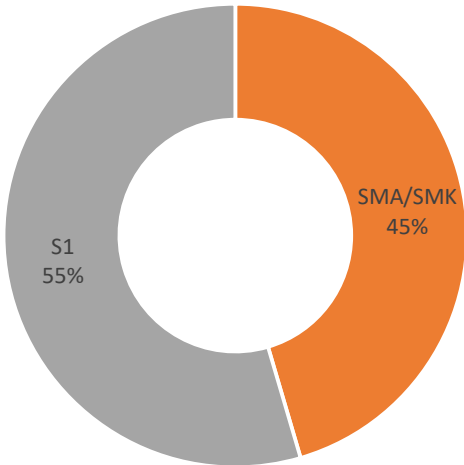
Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Kota Bangun per 31 Desember 2023 sebanyak 34 orang. Perincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut:

A. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.3. PNS Berdasarkan Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
SLTP				
SMA	12	3	15	
D1				
S1	17	1	18	
S2				
Jumlah	29	4	33	

Grafik 1.3. Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan



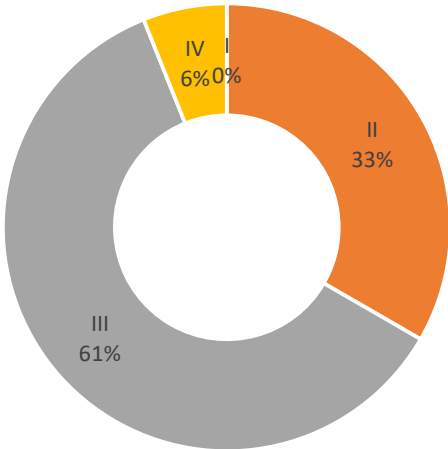


B. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.4. PNS Berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
I				
II	10	1	11	
III	17	3	20	
IV	2		2	
Jumlah	29	4	33	

Grafik 1.4. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan



1.5. Sumber Daya Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Kota Bangun pada Tahun 2023 berasal dari APBD Pemerintah Daerah. Pada Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Kota Bangun mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.404.151.565 yang diperuntukkan untuk belanja langsung dan belanja tak langsung serta untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program pendukung dengan rincian 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan.

1.6. Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Kota Bangun dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN KOTA BANGUN

permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Kota Bangun pada tahun 2021 - 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kecamatan Kota Bangun. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- b. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- c. Perkembangan lptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- d. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- e. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial yang mencakup peningkatan Pelayanan, tata kelola pemerintahan dan peningkatan SDM yang ada pada Kecamatan Kota Bangun adalah sebagai berikut :

- a. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- b. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- c. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- d. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
- e. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN**

pemerintah Kecamatan Kota Bangun dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat

1.7. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup Lampiran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kota Bangun merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang didalamnya menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan pada Kecamatan Kota Bangun yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

A. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

- Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
- Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
- Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

- d. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
- e. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

B. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kota Bangun adalah Misi ke-1 yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Kota Bangun Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi :				
“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kerja	Uraian	Indikator Kerja
Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti
				Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa
				Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan

C. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

SKPD Kecamatan Kota Bangun untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- 2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- 3. Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- 4. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 6. Meningkatkan kinerja dan tata kelola kecamatan

D. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan SKPD Kantor Camat Kota Bangun Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi Kecamatan Kota Bangun	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		Meningkatkan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
		Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		Meningkatkan Pemberdayaan Desa
3.	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4.	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

No.	Strategi Kecamatan Kota Bangun	Arah Kebijakan
6.	Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan	Meningkatkan fasilitas penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

E. Program

Program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2023, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

F. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perjanjian Kinerja Kecamatan Kota Bangun Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	75
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	75
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	70
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Persen	30
2	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK / Inspektorat yang di tindak lanjuti	Persen	100
3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang yang berada di pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100
4	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi Kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

5	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN PERTanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kapatuhan LHKASN PERTanggal 31 Maret 2023	Persen	100
6	Melaksanakan Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70
7	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
8	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
9	Terealisasi Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
10	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi kegiatan Keuangan	Persen	100
11	Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2
12	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
13	Melaksanakan tata Kelola Core Values ASN “ BerAKHLAK”	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja	Kegiatan	4
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN JP Per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
15	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,40
16	Terlaksananya Koordinasi Konvergensi	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	16,5



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

	penurunan stunting di Kecamatan			
17	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) Di Kecamatan	Angka	1
18	Mewujudkan Desa / Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persentase Desa / Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persen	45
19	Meningkatnya Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif	Poin	100
20	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Roko (KTR) Di perkantoran	Poin	100

Sumber : PK Kantor Camat Kota Bangun 2023

Di tahun terdapat 20 (enam) poin perjanjian kinerja dengan 25 (Dua Puluh Lima) indikator yang menjadi target Perangkat Daerah Kantor Camat Kota Bangun, dimana terdiri dari 4 (empat) indikator utama dan 16 (sebelas) indikator tambahan.

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Kota Bangun Tahun 2022 jika dibandingkan dengan data awal atau capaian kinerja pada tahun 2021 serta dengan target akhir dari Renstra perangkat daerah Kecamatan Kota Bangun tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.5.
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dengan Data Awal Tahun 2023 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Data Awal (2021)	Target 2023	Target Akhir Renstra 2026
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	N/a	75	77
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	75	75	77
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	69,65	70	72,23
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Persen	0	30	0



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

2	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK / Inspektorat yang di tindak lanjuti	Persen	N/a	100	N/a
3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang yang berada di pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di pengguna Barang Milik Daerah	Persen	N/a	100	N/a
4	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi Kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	N/a	100	N/a
5	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN PERTanggal 31 Maret 2023	Persen	N/a	100	N/a
		Tingkat Kapatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	N/a	100	N/a
6	Melaksanakan Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	N/a	Baik (B) 60-70	N/a
7	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	N/a	100	N/a
8	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	Jumlah Inovasi	Jumlah	N/a	1	N/a
9	Terealisasi Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	N/a	100	N/a
10	Melaksanakan percepatan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	N/a	100	N/a



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

	realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan Keuangan	Persen	N/a	100	N/a
11	Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko Maksimal 10 Januari	Laporan	N/a	2	N/a
12	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	N/a	1	N/a
13	Melaksanakan tata Kelola Core Values ASN “ BerAKHLAK”	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja	Kegiatan	N/a	4	N/a
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN JP Per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	N/a	100	N/a
15	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	N/a	0,40	N/a
16	Terlaksananya Koordinasi Konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	N/a	16,5	N/a
17	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) Di Kecamatan	Angka	N/a	1	N/a
18	Mewujudkan Desa / Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persentase Desa / Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persen	N/a	45	N/a
19	Meningkatnya Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif	Poin	N/a	100	N/a
20	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Roko (KTR) Di perkantoran	Poin	N/a	100	N/a

Sumber : Kantor Camat Kota Bangun 2023

3. Alokasi Anggaran Tahun 2023

Pada tahun Anggaran 2023, Kecamatan Kota Bangun melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD sebesar **Rp. 31.824.349.565,-** dan melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2023 yang bersumber dari APBD meningkat sebesar **Rp.**



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

54.401.966.922,-. Selanjutnya dapat kita lihat rincian penambahan alokasi anggaran Kantor Camat Kota Bangun Tahun 2023 pada tabel berikut :

Tabel 2.6. Alokasi Anggaran Kecamatan Kota Bangun Tahun 2023

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Alokasi Anggaran	Rp. 31.824.349.565	Rp. 54.401.966.922	Rp. 22.577.617.357

1. Alokasi Anggaran Belanja

Perencanaan pelaksanaan anggaran belanja dan setelah perubahan anggaran belanja Kecamatan Kota Bangun Tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7. Alokasi Anggaran Jenis Belanja Kecamatan Kota Bangun Tahun 2023

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Belanja Operasi	Rp. 31.404.151.565	Rp. 51.971.682.708	Rp. 20.567.531.143
Belanja Modal	Rp. 420.198.000	Rp. 2.430.284.214	Rp. 2.010.086.214
Total	Rp. 31.824.349.565	Rp. 54.401.966.922	Rp. 22.577.617.357

2. Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kecamatan Kota Bangun Tahun 2023 merencanakan 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan dengan rincian pada tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2.8.
Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.648.400.565	10.806.306.938	1.157.906.373
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.967.376	95.967.376	15.000.000



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.000.000	75.000.000	15.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.967.376	20.967.376	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.160.900.311	5.584.511.420	423.611.109
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.019.900.311	5.535.121.420	515.221.109
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.000.000	11.000.000	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	130.000.000	38.390.000	(91.610.000)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	91.927.864	41.927.864	(50.000.000)
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	91.927.864	41.927.864	(50.000.000)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	112.000.000	62.000.000	(50.000.000)
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	62.000.000	62.000.000	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	0	(50.000.000)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.030.866.816	1.287.402.080	256.535.264
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	306.535.264	256.535.264
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.500.000	20.500.000	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.366.816	65.366.816	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.000.000	70.000.000	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	20.000.000	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000	500.000.000	0
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000	100.000.000	0
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	200.000.000	200.000.000	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	685.560.000	1.285.560.000	600.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	535.560.000	1.285.560.000	750.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	0	(150.000.000)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.048.675.396	2.010.285.396	(38.390.000)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.031.960.000	1.031.960.000	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.010.715.396	972.325.396	(38.390.000)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	437.502.802	438.652.802	1.150.000



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.850.000	5.000.000	1.150.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	428.654.837	428.654.837	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.997.965	4.997.965	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	21.130.489.000	38.261.863.564	17.131.374.564
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan	10.000.000	0	(10.000.000)
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	10.000.000	0	(10.000.000)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	21.120.489.000	38.261.863.564	17.141.374.564
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	20.000.000	440.049.000	420.049.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	21.100.489.000	37.821.814.564	16.721.325.564
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	614.330.000	4.801.710.420	4.187.380.420
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	614.330.000	4.801.710.420	4.187.380.420
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	70.000.000	55.020.000	(14.980.000)
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	544.330.000	4.746.690.420	4.202.360.420
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	366.130.000	467.086.000	100.956.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	366.130.000	467.086.000	100.956.000
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras,dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	356.130.000	457.086.000	100.956.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000	10.000.000	0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	65.000.000	65.000.000	0
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	65.000.000	65.000.000	0
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	65.000.000	65.000.000	0
KECAMATAN KOTA BANGUN	31.824.349.565	54.401.966.922	22.577.617.357



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja Kecamatan Kota Bangun Tahun 2023, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sub bab ini akan disajikan target kinerja dalam perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja, capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja dengan target pembangunan jangka menengah, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibanding dengan capaian kinerja dan analisis program dan kegiatan yang mendukung capaian target kinerja, serta di uraikan cara pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target capaian tahun lalu.

Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/ indikator kinerja.

A. Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Kecamatan Kota Bangun dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja,



yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

- Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

- Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

a. Realisasi Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah

Realisasi target kinerja **Tujuan Renstra** Kecamatan Kota Bangun tahun 2023 yaitu sebesar **83,514** . Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja **BAIK**.



Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tujuan tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

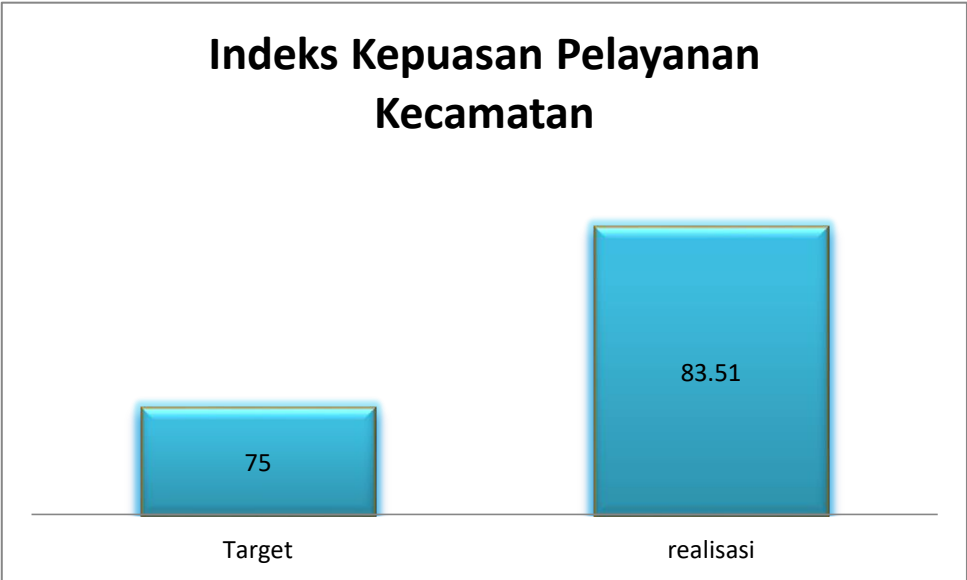
Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian	Formulasi Perhitungan	Penjelasan Faktor Pendukung Dan Penghambat Berhasil/ Gagalnya Capaian Kinerja
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	B (75)	83,514	111.35 %	Sangat Tinggi	Realisasi dibagi dengan Target	Realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melebihi dari target yag sudah ditetapkan dikarenakan unit pelayanan Kantor Camat Kota Bangun terus berbenah, memperbaiki serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Sumber : Kantor Camat Kota Bangun, 2022

Capaian Kinerja Tujuan Kecamatan Kota Bangun Tahun 2023 juga bisa dilihat pada gambar berikut:

Grafik 3.1



Adapun penjelasan capaian dari indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

- **Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat (IKM)**

Salah satu indikasi pemerintahan yang baik adalah keikutsertaan masyarakat dalam menentukan kebijakan publik yang akan diambil oleh pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator / agen pembangunan. Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam menilai (evaluation) atau umpan balik (feedback) terhadap semua bentuk aplikasi atau penerapan (implementation)



kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang diambil. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan.

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada tahun 2023 dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala likert. Pada skala likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Pelaksanaan kegiatan survey berlangsung pada bulan Januari dan Desember Tahun 2023 (1 Tahun) terhadap seluruh bidang Pelayanan. Sampel yang digunakan yaitu dengan memberikan kuesioner kepada Responden yang mendapatkan pelayanan pada unit pelayanan Kantor Camat Kota Bangun pada bulan pelaksanaan survey.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dimana pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya / Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksanaan
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, sarana dan masukan
9. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil survey diperoleh data yang dihimpun dari 567 (Lima ratus Enam Puluh Tujuh) kuesioner, maka didapatkan nilai rata-rata dari 9



(sembilan) unsur pelayanan pada tahun 2023 seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Analisa Hasil Survey

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,21	3,25	3,20	3,97	3,23	3,28	3,24	3,21	3,45
Kategori	B	B	B	B	B	B	B	B	B
IKM Unit Layanan	83, 514 (Baik)								

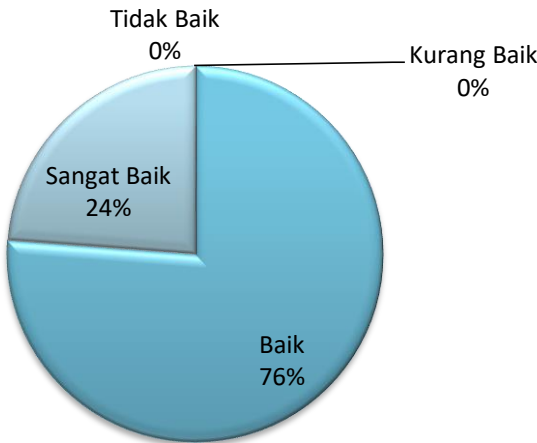
Sumber : Kantor Camat Kota Bangun, 2023

Berdasarkan Tabel 3.3 Indikator Kinerja Tujuan “Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan” tahun 2023 memperoleh nilai **83,51** dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar **111,35%**, sehingga target kinerja **tercapai**. Hal-hal yang membuat target kinerja tercapai/Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dikarenakan unit pelayanan Kantor Camat Kota Bangun terus berbenah, memperbaiki serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tabel analisa hasil survey diperoleh nilai indeks pelayanan untuk 9 (sembilan) unsur pelayanan, untuk penjelasan masing-masing unsur pelayanan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

a. Unsur Persyaratan

Kesesuaian Persyaratan



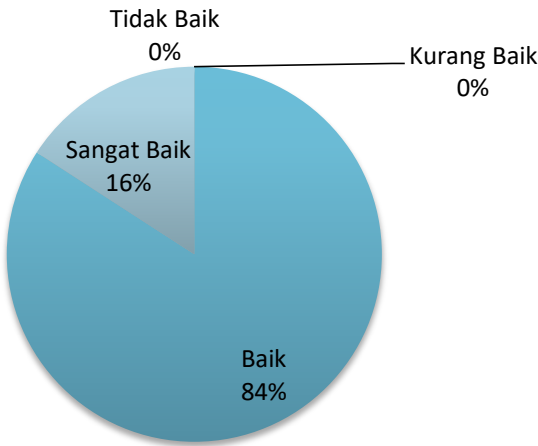
Grafik 3.2. Penilaian Responden Berdasarkan Persyaratan



Dapat dilihat kesesuaian persyaratan mendapat penilaian 76% baik sedangkan sangat baik sebesar 24%, untuk tidak baik dan kurang baik masing-masing 0%, ini berarti bahwa pelayanan yang diberikan kepada responden untuk unsur persyaratan yang diajukan sudah sesuai SOP yang ada.

b. Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Prosedur Pelayanan

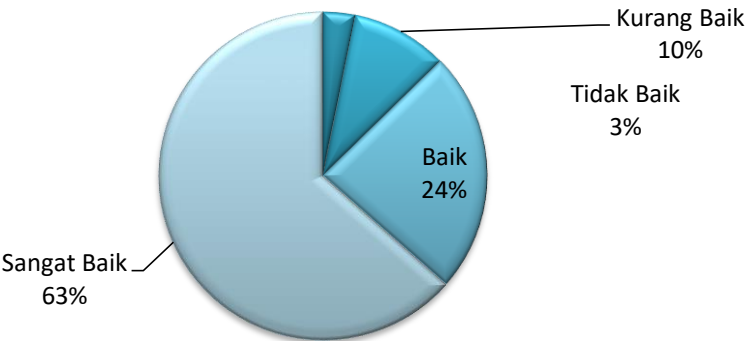


Grafik 3.3. Penilaian Responden Berdasarkan Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dapat dilihat kemudahan dalam melakukan pengurusan mendapat penilaian Baik Sebesar 84 % sedangkan sangat baik sebesar 16%, untuk tidak baik dan kurang baik masing-masing 0%, ini berarti bahwa kemudahan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan yang diberikan kepada responden untuk unsur kedua sudah sesuai SOP yang ada.

c. Unsur Waktu Penyelesaian

Kecepatan Pelayanan





Grafik 3.4. Penilaian Responden Berdasarkan Waktu Penyelesaian

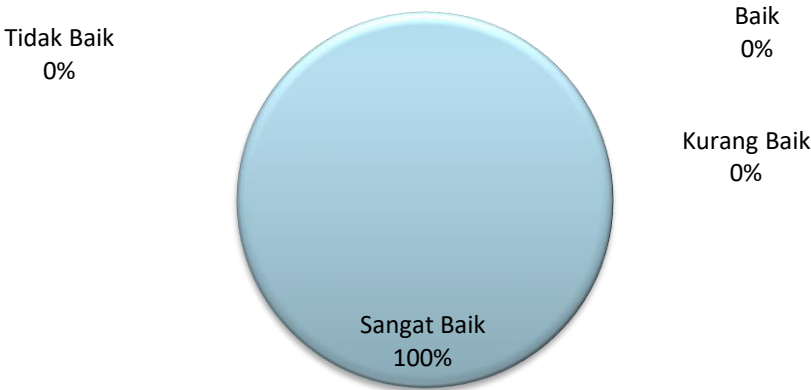
Dapat dilihat kecepatan waktu dalam penyelesaian berkas mendapat penilaian baik 68% sedangkan sangat baik sebesar 30%, untuk tidak baik dan kurang baik masing-masing 0% dan 2%, ini berarti bahwa tingkat kecepatan petugas dalam melakukan pelayanan serta penyelesaian berkas sudah sesuai SOP yang ada, walaupun masih ada total 2% yang menyatakan pelayanan yang diberikan lambat, dan ini akan menjadi evaluasi selanjutnya agar dapat meningkatkan lagi kinerjanya.

d. Unsur Biaya / Tarif

Untuk unsur pelayanan keempat yaitu kesesuaian biaya / tarif yang diberikan oleh petugas kepada jenis pelayanan yang ada didapat sebesar 100% Sangat Baik

Ini berarti biaya / tarif yang diberikan oleh petugas sudah sesuai SOP yang ada berdasarkan jenis pelayanan yang diurus oleh responden.

Kesesuaian/ Kewajaran Biaya

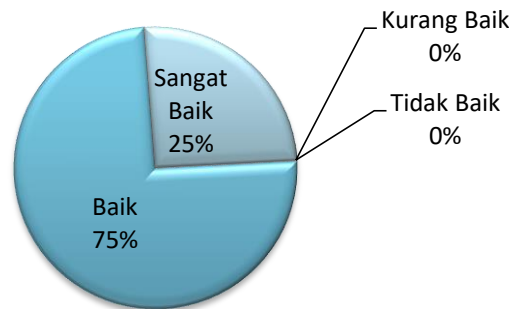


Grafik 3.5. Penilaian Responden Berdasarkan Kesesuaian / Kewajaran Biaya



e. Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Kesesuaian Pelayanan

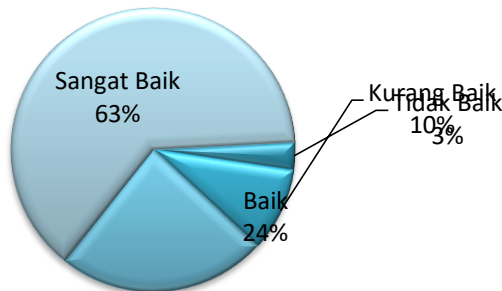


Grafik 3.6. Penilaian Responden Berdasarkan Spesifikasi Jenis Pelayanan

Dapat dilihat kesesuaian produk spesifikasi jenis pelayanan mendapat penilaian 75 baik % sedangkan sangat baik sebesar 25 %, untuk tidak sesuai dan kurang sesuai masing-masing 0%, ini berarti bahwa pelayanan yang diberikan kepada responden untuk unsur produk spesifikasi jenis pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan yang ada di masing-masing unit pelayanan kantor camat Kota Bangun sudah sesuai peraturan pemerintah dan SOP yang ada.

f. Unsur Kompetensi Pelaksanaan

Kompetensi Petugas



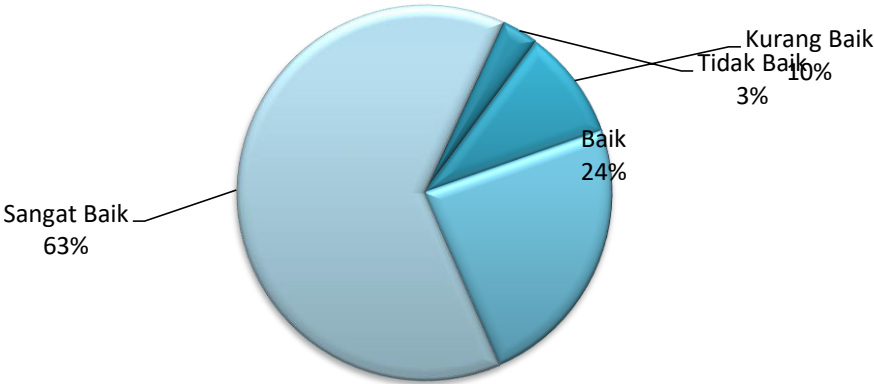
Grafik 3.7. Penilaian Responden Berdasarkan Kompetensi petugas

Dari Unsur pelayanan yang keenam ini dapat dilihat hasil kompetensi petugas dengan kategori mampu mendapat penilaian 70 % baik sedangkan sangat baik sebesar 30%, untuk tidak mampu dan kurang mampu masing-masing 0%, ini berarti bahwa petugas pelayanan yang ada pada masing-masing unit pelayanan sudah memahami dan menguasai tugas mereka dalam memberikan pelayanan.



g. Unsur Perilaku pelaksana

Perilaku Petugas Pelayanan

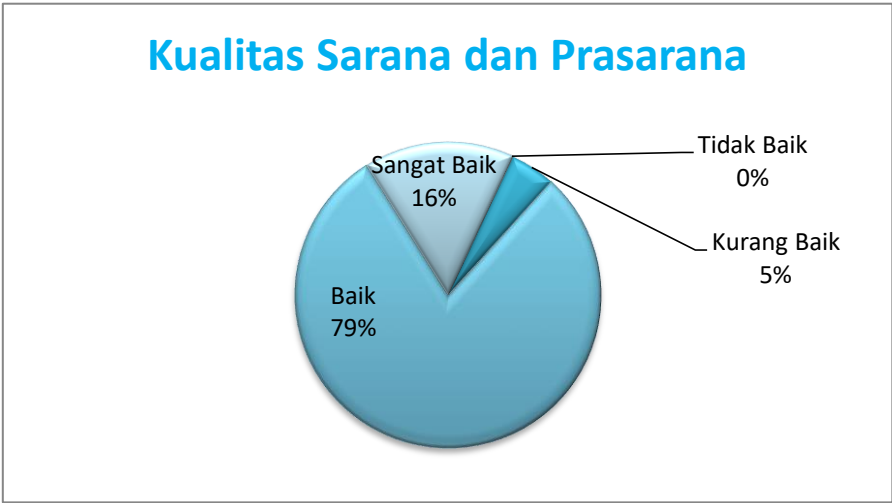


Grafik 3.8. Penilaian Responden Berdasarkan Perilaku Pelaksana

Dari Unsur pelayanan perilaku pelaksana dapat dilihat untuk seluruh petugas dalam melakukan pelayanan kepada responden mendapat kategori sopan/ramah dan sangat sopan/sangat ramah.

Petugas selain dituntut harus menguasai aturan serta SOP yang ada, petugas juga harus bisa tetap ramah dan sopan dalam melayani serta memahami berbagai karakter responden yang datang ke unit pelayanan, ini dikarenakan agar petugas bisa selalu menjaga kenyamanan dan keamanan dilingkungan unit pelayanan.

h. Unsur Sarana dan Prasarana



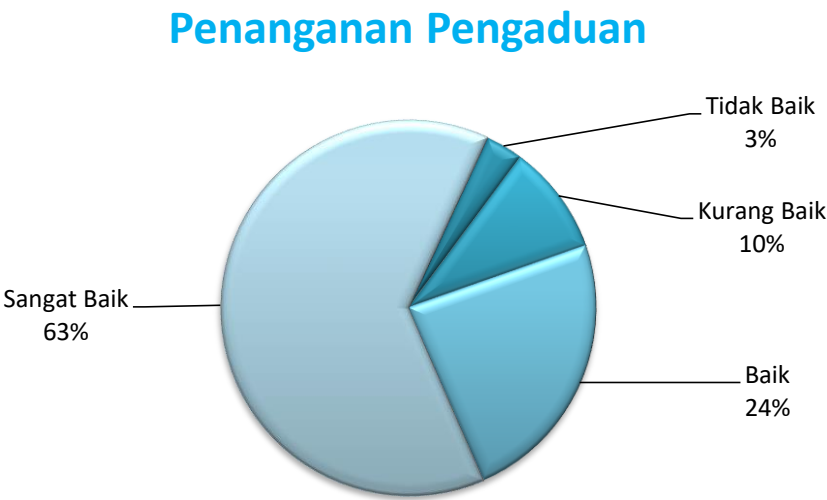
Grafik 3.10. Penilaian Responden Berdasarkan Sarana dan Prasarana

Dari Unsur sarana dan prasarana dapat dilihat kualitas sarana dan prasarana untuk kategori baik sebesar 79%, sangat baik sebesar 16% dan Kurang Baik sebesar 5%. Dari tahun ketahun unit pelayanan Kecamatan Kota



Bangun selalu melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada agar pelayanan yang diberikan kepada responden atau masyarakat tidak terhambat.

i. Unsur Penanganan Pengaduan, sarana dan masukan



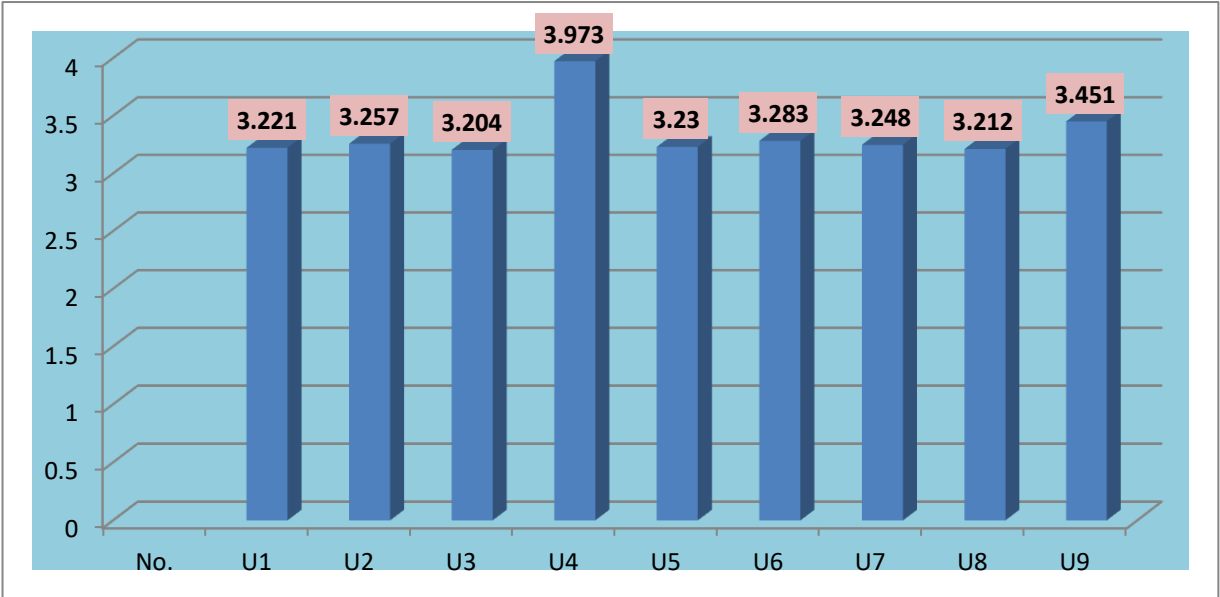
Grafik 3.9. Penilaian Responden Berdasarkan Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan

Dari Unsur pelayanan penanganan pengaduan, sarana dan masukan dapat dilihat penanganan pengaduan dapat dikelola dengan baik sebesar 24 %, Sangat Baik sebesar 63 %, kurang baik sebesar 10% dan dari hasil ini ada sebesar 3% responden yang menilai penanganan aduan oleh petugas tidak baik dan ini akan menjadi evaluasi unit pelayanan agar dapat dengan sigap dan cepat dalam menangani masalah apabila terjadi aduan oleh responden / masyarakat yang kurang puas akan pelayanan yang diberikan.

Dari keseluruhan unsur pelayanan yang telah memperoleh hasil dimana unsur ke 4 yaitu biaya / tarif memperoleh nilai indeks paling tinggi dari unsur yang lain yaitu sebesar 3,973 sedangkan unsur pelayanan yang mendapat nilai paling rendah yaitu unsur waktu penyelesaian sebesar 3,204. Selanjutnya unsur waktu penyelesaian akan menjadi bahan evaluasi oleh tim unit pelayanan Kecamatan Kota Bangun dalam memberikan pelayanan kepada responden atau masyarakat. Terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian berkas dipicu dari beberapa hambatan yang memang sering terjadi jaringan internet yang tidak stabil dan gangguan pada system aplikasi



Hambatan-hambatan yang ada akan ditanggulangi oleh tim unit pelayanan pada tahun selanjutnya dengan mengusulkan penambahan jaringan internet/wifi untuk menunjang kenyamanan, ketepatan, kecepatan dan keamanan responden atau masyarakat yang ada diwilayah Kecamatan Kota Bangun. Berikut hasil nilai indeks penilalain ke sembilan unsur pelayanan adalah



Grafik 3.11. Hasil Penilaian 9 Unsur Pelayanan

b. Realisasi Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

Target kinerja sasaran diambil dari indikator-indikator yang menjadi Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah pada tahun 2023. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian	Formulasi Perhitungan	Penjelasan Faktor Pendukung Dan Penghambat Berhasil/ Gagalnya Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	76	80	142.86	Sangat Tinggi	(Jumlah keluhan yang diselesaikan) / (Jumlah Total Keluhan keseluruhan pertahun) x 100	Sarana dan prasarana yang belum optimal
	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	76	100	133.33	Sangat Tinggi	(Jumlah Kejadian yang dinyatakan sebagai kasus Trantimum) / total kasus trantibun di Kecamatan x 100	Sarana dan prasarana yang belum optimal



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	70	15.7	22.43	Sangat Rendah	Total PADes Tahun berjalan (N) - Total PADes tahun Sebelumnya (N-1) /Total PADes tahun Sebelumnya (N-1) x 100	Inovasi dan sistem pelaporan yang tidak efektif
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Persen	30	N/A	N/A	N/A		Untuk indikator sasaran Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan bukan lagi kewenangan kecamatan dari tahun 2022 sudah dilaksanakan oleh dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP)
Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK / Inspektorat yang di tindak lanjuti	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	Persentase Jumlah temuan yang di tindak lanjuti / Jumlah Temuan	Temuan BPK atas kelebihan pembayaran Honorarium Rohaniawan sebesar Rp 400.000 an Syamsul Bahri yang sudah di lakukan pengembalian
Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang yang berada di pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	Persentase Jumlah Laporan BMD yang di sajikan / jumlah Laporan BMD dalam Setahun	Laporan yang dilakukan pertriwulan dan per semester
Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi Kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	Persentase Keterinputan SIRUP	Kurang stabilnya jaringan server aplikasi
Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN PERTanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	Persentase Keterinputan LHKPN	Seluruh Pejabat Struktural Yang Wajib Lapor Sudah Melaporkan Pada Aplikasi LHKPN Per 31 Maret 2023
	Tingkat Kapatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	Persentase Keterinputan LHKASN	Seluruh ASN Yang Wajib Melaporkan SPT Per 31 Maret 2023
Melaksanakan Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predika t	Baik (B) 60- 70	B	100	Sangat Tinggi	Penilaian yang di lakukan diarpus	fasilitas ruang yang kurang



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	Persentase keterisian data	Kurang optimalnya Aplikasi yang ada
Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	0	0	Sangat Rendah	jumlah inovasi yang implementasikan	Kurangnya dukungan untuk implentasi inovasi
Terealisasi Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	Persentase Kegiatan yang terealisasi tidak utang di bagi jumlah kegiatan yang terealiasasi	Tidak Ada Utang Belanja Kegiatan Untuk Tahun 2023
Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	Persentase Kegiatan yang terealisasi di bagi jumlah kegiatan	Proaktifnya PPTK dalam merealisasikan kegiatan
	Persentase realisasi kegiatan Keuangan	Persen	100	92	92	Sangat Tinggi	Persentase Anggaran yang terealisasi di bagi jumlah anggaran setahun	Kegiatan fisik terbayarkan karena dukungan data dari PPTKkegiatan
Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko Maksimal 10 Januari	Lapora n	2	1	50	Sangat Rendah	Jumlah Laporan yang tersusun	Bukti dukung yang masih kurang
Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokum en	1	0	0	Sangat Rendah	dokumen yang direviu	Bukti dukung yang masih kurang
Melaksanakan tata Kelola Core Values ASN “ BerAKHLAK”	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja	Kegiata n	4	4	100	Sangat Tinggi	Persentase Jumlah kegiatan yang di lakukan	Dukungan positif dari ASN
Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN JP Per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	Persentase Jumlah JP pertahun di bagi Target JP per tahun	Kegiatan Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang tersedia
Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0.4	0.33	82.5	Tinggi	Nilai	Dukungan dari stakeholder
Terlaksananya Koordinasi Konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	16.5	12.6	76.36	Tinggi	Nilai	Dukungan dari stakeholder
Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) Di Kecamatan	Angka Kematian Ibu (AKI) Di Kecamatan	Angka	1	1	100	Sangat Tinggi	Nilai	Dukungan dari stakeholder



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

Mewujudkan Desa / Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persentase Desa / Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persen	45	23	71.89	Sedang	Nilai	Dukungan dari stakeholder
Meningkatnya Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif	Poin	100	100	100	Sangat Tinggi	Nilai	Dukungan dari stakeholder
Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Roko (KTR) Di perkantoran	Poin	100	37.5	37.5	Sangat Rendah	Persentase ruang Tanpa rokok di bagi jumlah ruang kantor	Sarana ruang khusus yang tidak ada

Sumber : Kantor Camat Kota Bangun, 2023

Adapun penjelasan capaian dari indikator kinerja sasaran Kantor Camat Kota Bangun pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja ke-1 (Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti)

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-1” tahun 2023 yaitu 75 % dan realisasinya sebesar 80 %, sehingga capaian target kinerja tercapai sebesar **114.29 %** dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Dalam pencapaian target ini tentunya juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya yaitu kondisi Jaringan Internet yang tidak stabil, lalu perbaikan kerusakan peralatan (alat perekaman) yang harus memakan waktu cukup lama dikarenakan harus dibawa ke Kabupaten. Tentunya beberapa kendala ini dapat ditangani sehingga pelayanan yang diberikan bisa maksimal, hasil ini dapat diklaim berhasil atau tercapai oleh Kecamatan Kota Bangun yaitu dengan tidak adanya aduan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan selama tahun 2023.

2) Indikator Kinerja Ke-2 (Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum)

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-2” tahun 2023 yaitu 75% dan terealisasi sebesar 100%. Capaian kinerja pada indikator ke-2 sebesar **142 %** dengan predikat **Sangat Tinggi**. Hasil ini diperoleh dari selama Tahun 2023 yang dilaporkan oleh bagian trantib terjadi 5 kasus gangguan keamanan dan semua kasus bisa dimediasi dan difasilitasi oleh pihak Kecamatan dan terselesaikan dengan baik. Adapun factor yang mendukung dengan adanya personel Linmas kecamatan yang mendukung staf yang ada di bagian trantib.

3) Indikator Kinerja Ke-3 (Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa)



Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan berupa uang yang dihasilkan dari Kekayaan dan Aset Desa yang digunakan oleh Pihak ketiga dengan Perjanjian Sewa, Kontrak dan Pinjam Pakai, dari Perusahaan yang berada diwilayah desa Baik Perusahaan yang Bersifat BUMN dan BUMD dan Perusahaan Swasta berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa memiliki sumber pendapatan yang berasal dari Pengelolaan Aset Desa pungutan desa yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Target kinerja pada indikator ke-3 di tahun 2023 yaitu sebesar 70 % dan untuk realisasinya sebesar 15,70 %, capaian kinerja pada indikator ini sebesar **22.43 %** dengan predikat **Sangat Rendah**. Hasil ini diperoleh dari perhitungan pertumbuhan asli desa yang ada pada 11 (sebelas) desa di wilayah Kecamatan Kota Bangun untuk dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.5
Pendapatan Asli Desa Diwilayah Kecamatan Kota Bangun Tahun 2023

No.	DESA			KET
		TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	
1	Kota Bangun Ulu		3,000,000.00	
2	Loleng	12,325,500.00		
3	Liang			
4	Kota Bangun Ilir			
5	Pela	3,600,000.00	5,635,000.00	
6	Muhuran			
7	Kota Bangun Seberang	12,851,400.00	14,323,800.00	
8	Kedang Murung	13,443,650.00	24,099,260.00	
9	Liang Ulu	2,600,000.00	6,050,681.00	
10	Sebelimbingan			
11	Sangkuliman	1,078,500.00		
Jumlah PAD		45,899,050.00	53,108,741.00	

Sumber : Kecamatan Kota Bangun, 2023

Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa Yang Ada Di Wilayah Kecamatan Kota Bangun untuk Tahun 2023 yaitu:

$$\begin{aligned} &= \frac{(PAD_n - PAD_{n-1})}{PAD_{n-1}} \times 100 \\ &= \frac{(Rp. 53,108,741 - Rp. 45,899,050)}{Rp. 45,899,050} \times 100 \end{aligned}$$



= 15.70%

Adapun capaian kinerja untuk indikator pertumbuhan pendapatan asli desa yaitu

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$= \frac{15.70}{70} \times 100$$

= 22.43 %

4) Indikator Kinerja Ke-4 (Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan)

Target kinerja pada indikator ke-4 di tahun 2023 yaitu sebesar 0 % dan untuk realisasinya sebesar 0%, capaian kinerja pada indikator ini sebesar **0%** dengan predikat **Sangat Rendah**. Untuk indikator sasaran Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan bukan lagi kewenangan kecamatan dari tahun 2022 sudah dilaksanakan oleh dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP).

5) Indikator Kinerja Ke-5 (Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja)

Target kinerja "Indikator Kinerja ke-5 tahun 2023 yaitu menindak lanjuti temuan BPK/Inspektorat sebanyak 1 temuan di tahun 2022 terealisasi sebanyak 1 temuan yang ditindak lanjuti

Temuan ini sudah ditindaklanjuti dan ditanggapi melalui STS Pengembalian atas belanja GU biaya honorarium Rohaniawan kegiatan musrenbang kecamatan Kota Bangun nomor : 094/900/STS/KOBA/5/2023, tanggal 23 Mei 2023 .Dari hasil tindak lanjut diatas capaian kinerja yang diperoleh yaitu sebesar **100%**, sehingga target kinerja tercapai dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**.

6) Indikator Kinerja ke-6 (Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang yang berada di pengguna Barang Milik Daerah)

Target kinerja indikator ke-6 tahun 2023 yaitu sebesar 100% dari Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di pengguna Barang Milik Daerah, dan terealisasi sebesar 100%, hasil ini diperoleh dari Berita Acara hasil rekonsiliasi aset tetap, kertas kerja rekonsiliasi dan daftar inventaris barang yang memuat seluruh barang milik daerah tercatat lengkap dalam aplikasi SIMDA BMD, Atas hasil tersebut capaian kinerja yang



diperoleh sebesar **100%**, sehingga target kinerja tercapai dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**.

7) Indikator Kinerja ke-7 (Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa)

Target kinerja indikator ke-7 tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Dari target Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2023), Kecamatan Kota Bangun sudah menginput seluruh kegiatan baik secara swakelola maupun pengadaan yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Camat Kota Bangun Tahun 2023 di Aplikasi SIRUP melalui link <https://sirup.lkpp.go.id> sehingga realisasi target yang tercapai yaitu sebesar **100%** dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**

8) Indikator Kinerja ke-8 (Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023)

Target kinerja indikator ke-8 tahun 2023 yaitu sebesar 100%, berdasarkan hasil monitoring dari 4 pejabat struktural yang wajib lapor semuanya sudah mengisi LHKPN di website <https://elhkpn.kpk.go.id> sebelum tanggal 31 maret 2023. Untuk indikator ke-9 diperoleh realisasi sebesar **100%** dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**.

9) Indikator Kinerja ke-9 (Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023)

Target kinerja indikator ke-9 tahun 2023 yaitu sebesar 100 %, berdasarkan hasil monitoring dari 31 ASN yang menjadi target terdapat 31 ASN yang telah menyampaikan SPT tahunan, sehingga diperoleh realisasi capaian target sebesar 100% dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi. Kedepannya berdasarkan hasil ini Kecamatan Kota Bangun khususnya di sub bagian umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian akan lebih ketat dalam melakukan pengawasan dan monitoring kepada seluruh ASN agar tingkat kepatuhan dalam melaporkan LHKASN/ SPT terealisasi sesuai target kinerja yang sudah ditetapkan.

10) Indikator Kinerja ke-10 (Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah)



Target kinerja indikator ke-10 pada tahun 2023 yaitu memperoleh predikat/nilai sebesar Baik (B) / 60-70. Untuk indikator tata kelola arsip perangkat daerah. Kecamatan Kota Bangun memperoleh predikat/nilai Baik (B) dari hasil audit tim tata kelola arsip perangkat daerah. Berdasarkan hasil tersebut, capaian realisasi kinerja pada indikator ini sebesar **100%** dengan kriteria penilaian **Baik**. Tidak tercapainya target kinerja disebabkan oleh beberapa hambatan yaitu karena kurangnya sumber daya manusia, tidak adanya arsiparis yang secara khusus mengelola arsip, belum adanya pelatihan tentang kearsipan yang diberikan kepada aparatur kecamatan, serta sarana dan prasarana yang belum tersedia secara lengkap dalam mengelola arsip. Kedepannya Kecamatan Kota Bangun akan melengkapi sarana dan prasarana dalam pengelolaan arsip serta berkoordinasi dan konsultasi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bagaimana Standar (SOP) dalam pengelolaan arsip dengan baik dan benar.

11) Indikator Kinerja ke-11 (Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar)

Indikator kinerja ke-11 yaitu Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar, yang mana target pada tahun 2023 sebesar 100%. Target keterisian data pada aplikasi Becik dan E-pantau yaitu sudah **100%** sehingga target pada indikator ini mendapat kriteria **Sangat Tinggi**. Hasil laporan keterisian data Becik bisa dilihat pada link <https://becik.kukarkab.go.id> dan E-Pantau pada link <https://e-pantau.kukarkab.go.id>, adapun hasil pelaporan bisa dilihat pada gambar berikut :

12) Indikator Kinerja ke-12 (Jumlah Inovasi)

Indikator kinerja ke-12 yaitu Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah sebanyak 1 (satu) inovasi. Untuk tahun 2023 Kecamatan Kota Bangun tidak membuat atau mengusulkan inovasi sesuai target kinerja yang sudah ditetapkan sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar **0%** dengan predikat **Sangat Rendah**

13) Indikator Kinerja ke-13 (Capaian Output Kegiatan)

Indikator kinerja ke-15 yaitu Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang. Untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2023 seluruhnya terlaksana dan terealisasi sebesar 100%, tidak ada kegiatan yang menjadi utang atau tidak dapat dilaksanakan. Jadi, untuk indikator terakhir ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar **100%** dengan predikat **Sangat Tinggi**.

14) Indikator Kinerja ke-14 (Capaian Output Kegiatan)



Indikator kinerja ke-14 yaitu realisasi Kegiatan fisik dan keuangan pada pelaksanaan kegiatan tahun 2023 seluruhnya terlaksana dan terealisasi untuk fisik sebesar 100% untuk realisasi keuangan sebesar 92 %, tidak ada kegiatan yang menjadi utang atau tidak dapat dilaksanakan. Jadi, untuk indikator ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar **100%** dengan predikat **Sangat Tinggi**.

15)Indikator Kinerja ke-15 (Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko Maksimal 10 Januari)

Indikator kinerja ke-15 yaitu realisasi Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko pada pelaksanaan kegiatan tahun 2023 yang capaian nya hanya hanya 1 tersedia laporan per tanggal 10 januari 2023. Jadi, untuk indikator ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar **50%** dengan predikat **Sangat Rendah**

16)Indikator Kinerja ke-16 (Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama)

Indikator kinerja ke-16 yaitu realisasi Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama pada pelaksanaan kegiatan tahun 2023 yang capaian nya tidak tersedia. Jadi, untuk indikator ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar **0 %** dengan predikat **Sangat Rendah**

17)Indikator Kinerja ke-17 (Melaksanakan tata Kelola Core Values ASN “ BerAKHLAK”)

Indikator kinerja ke-17 yaitu realisasi tata Kelola Core Values ASN “ BerAKHLAK” pada pelaksanaan kegiatan tahun 2023 yang targetnya 4 kegiatan dengan realisasi yang tercapai 4 kegiatan . Jadi, untuk indikator ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar **100 %** dengan predikat Sangat Tinggi yang tidak lepas dari dukungan positif ASN SKPD

18)Indikator Kinerja ke-18 (Persentase Pengembangan Kompetensi ASN)

Indikator kinerja ke-18 yaitu realisasi tata Kelola Core Values ASN “ BerAKHLAK” pada pelaksanaan kegiatan tahun 2023 yang targetnya 4 kegiatan dengan realisasi yang tercapai 4 kegiatan . Jadi, untuk indikator ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar **100 %** dengan predikat Sangat Tinggi yang tidak lepas dari dukungan positif ASN SKPD

19)Indikator Kinerja ke-19 (Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indikator kinerja ke-19 yaitu realisasi **Indeks Keluarga Sehat** pada pelaksanaan kegiatan tahun 2023 Untuk menyatakan bahwa suatu keluarga



sehat atau tidak, ada sejumlah penanda atau indikator yang digunakan. Dalam rangka pelaksanaan Program Indonesia Sehat, telah disepakati ada 12 indikator utama. yang target indeks Keluarga Sehat sebesar 0.40 kegiatan dengan realisasi yang tercapai 0.33 . Jadi, untuk indikator ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar **82.5 %** dengan predikat Tinggi yang tidak lepas dari dukungan stakeholder yang berkenaan

20)Indikator Kinerja ke-20 (Penurunan Prevalensi stunting)

Indikator kinerja ke-20 yaitu realisasi **Penurunan Prevalensi stunting** pada pelaksanaan kegiatan tahun 2023 12.6 % dengan target 16.5 % . Jadi, untuk indikator ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar **76.36 %** dengan predikat Tinggi yang tidak lepas dari dukungan stakeholder yang berkenaan

21)Indikator Kinerja ke-21 (Menurunnya Angka Kematian Ibu)

Indikator kinerja ke-21 yaitu realisasi Menurunnya Angka Kematian Ibu pada pelaksanaan kegiatan tahun 2023 sebesar poin 1 dengan target 1 poin . Jadi, untuk indikator ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100 % dengan predikat sangat Tinggi yang tidak lepas dari dukungan stakeholder yang berkenaan

22)Indikator Kinerja ke-22 (Mewujudkan Desa / Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)

Indikator kinerja ke-22 yaitu Mewujudkan Desa / Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dimana konsistensi individu dalam komunitas tidak Buang Air Besar Sembarangan (BABS). pada pelaksanaan kegiatan tahun 2023 terealisasi sebesar 23 % dari 45 % yang ditargetkan. Jadi, untuk indikator ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar **71.89 %** dengan predikat Sedang yang tidak lepas dari dukungan stakeholder yang berkenaan

23)Indikator Kinerja ke-23 (Persentase Posyandu Aktif)

Indikator kinerja ke-23 yaitu Persentase Posyandu Aktif pada pelaksanaan kegiatan tahun 2023 terealisasi sebesar 100 % dari 28 Posyandu yang ada. Jadi, untuk indikator ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100 % dengan predikat Sangat Tinggi yang tidak lepas dari dukungan stakeholder yang berkenaan



24)Indikator Kinerja ke-24 (Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di perkantoran)

Indikator kinerja ke-23 yaitu Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di perkantoran

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Ket.
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	2022	71	80.37	113.20	Menurun
			Nilai	2023	76	83.51	109.9	

pada pelaksanaan kegiatan tahun 2023 terealisasi hanya sebesar 37.5 % dari 100% yang ditargetkan. Jadi, untuk indikator ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar 37.5 % dengan predikat Sangat Rendah yang menjadi perhatian untuk dievaluasi

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya
- a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Perangkat Daerah

Target Indikator Tujuan Kecamatan Kota Bangun yaitu Indeks Kepuasan

Pelayanan Kecamatan dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel. Realisasi kinerja Tujuan Kantor Camat Kota Bangun tahun 2023 diperoleh Nilai Indeks Kepuasan sebesar **83,514 %**. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022) dengan nilai indeks kepuasan sebesar **80,37 %**. Terjadi peningkatan realisasi sebesar **3,14%**. Akan tetapi jika dibandingkan terhadap target kinerja yang telah ditetapkan diperoleh capaian kinerja sebesar **109,9 %** sedangkan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya (tahun 2022) sebesar **113,20%**. Adapun faktor pendukung dan kendala yang dihadapi unit pelayanan Kantor Camat Kota Bangun yaitu hal ini disebabkan unit pelayanan Kecamatan Kota Bangun terus berbenah, memperbaiki sarana dan prasarana, serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan lebih efisien.

Tentunya dengan hasil yang sudah dicapai ini tidak terlepas dari adanya hambatan yang muncul pada saat pelayanan diberikan, hambatan yang sering terjadi belum optimalnya fitur fitur aplikasi pelayanan

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian	Formulasi Perhitungan	Penjelasan Faktor Pendukung Dan Penghambat Berhasil/Gagalnya Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	76	80	142.86	Sangat Tinggi	(Jumlah keluhan yang diselesaikan) / (Jumlah Total Keluhan keseluruhan pertahun) x 100	Sarana dan prasarana yang belum optimal
	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	76	100	133.33	Sangat Tinggi	(Jumlah Kejadian yang dinyatakan sebagai kasus Trantimbun) / total kasus trantibun di Kecamatan x 100	Sarana dan prasarana yang belum optimal
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	70	15.7	22.43	Sangat Rendah	Total PADes Tahun berjalan (N) - Total PADes tahun Sebelumnya (N-1) /Total PADes tahun Sebelumnya (N-1) x 100	Inovasi dan sistem pelaporan yang tidak efektif
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Persen	30	N/A	N/A	N/A		Untuk indikator sasaran Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan bukan lagi kewenangan kecamatan dari tahun 2022 sudah dilaksanakan oleh dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP)
Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK / Inspektorat yang di tindak lanjuti	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	Persentase Jumlah temuan yang di tindak lanjuti / Jumlah Temuan	Temuan BPK atas kelebihan pembayaran Honorarium Rohaniawan sebesar Rp 400.000 an Syamsul Bahri yang sudah di lakukan pengembalian
Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang yang berada di pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	Persentase Jumlah Laporan BMD yang di sajikan / jumlah Laporan BMD dalam Setahun	Laporan yang dilakukan pertriwulan dan per semester



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi Kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	Persentase Keterinputan SIRUP	Kurang stabilnya jaringan server aplikasi
Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN PErtanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	Persentase Keterinputan LHKPN	Seluruh Pejabat Struktural Yang Wajib Lapor Sudah Melaporkan Pada Aplikasi LHKPN Per 31 Maret 2023
	Tingkat Kapatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	95	95	Sangat Tinggi	Persentase Keterinputan LHKASN	Seluruh ASN Yang Wajib Melaporkan SPT Per 31 Maret 2023
Melaksanakan Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	B	100	Sangat Tinggi	Penilaian yang di lakukan diarpus	fasilitas ruang yang kurang
Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	Persentase keterisian data	Kurang optimalnya Aplikasi yang ada
Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	0	0	Sangat Rendah	jumlah inovasi yang implementasikan	Kurangnya dukungan untuk implentasi inovasi
Terealisasi Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	Persentase Kegiatan yang terealisasi tidak utang di bagi jumlah kegiatan yang terealisasi	Tidak Ada Utang Belanja Kegiatan Untuk Tahun 2023
Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	Persentase Kegiatan yang terealisasi di bagi jumlah kegiatan	Proaktifnya PPTK dalam merealisasikan kegiatan
	Persentase realisasi kegiatan Keuangan	Persen	100	92	92	Sangat Tinggi	Persentase Anggaran yang terealisasi di bagi jumlah anggaran setahun	Kegiatan fisik terbayarkan karena dukungan data dari PPTKegiatan



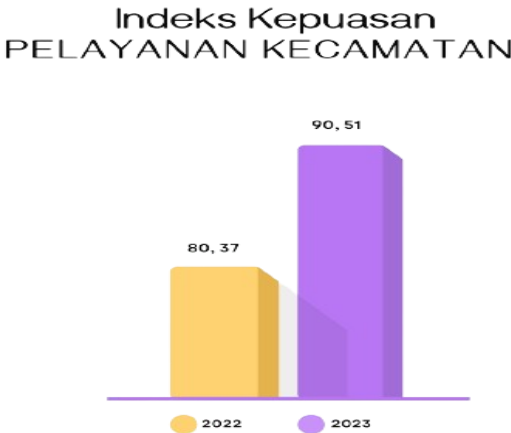
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2	1	50	Sangat Rendah	Jumlah Laporan yang tersusun	Bukti dukung yang masih kurang
Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	0	0	Sangat Rendah	dokumen yang direviu	Bukti dukung yang masih kurang
Melaksanakan tata Kelola Core Values ASN “ BerAKHLAK”	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja	Kegiatan	4	4	100	Sangat Tinggi	Persentase Jumlah kegiatan yang di lakukan	Dukungan positif dari ASN
Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN JP Per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	Persentase Jumlah JP pertahun di bagi Target JP per tahun	Kegiatan Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang tersedia
Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0.4	0.33	82.5	Tinggi	Nilai	Dukungan dari stakeholder
Terlaksananya Koordinasi Konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	16.5	12.6	76.36	Tinggi	Nilai	Dukungan dari stakeholder
Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) Di Kecamatan	Angka Kematian Ibu (AKI) Di Kecamatan	Angka	1	1	100	Sangat Tinggi	Nilai	Dukungan dari stakeholder
Mewujudkan Desa / Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persentase Desa / Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persen	45	23	71.89	Sedang	Nilai	Dukungan dari stakeholder
Meningkatnya Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif	Poin	100	100	100	Sangat Tinggi	Nilai	Dukungan dari stakeholder
Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Roko (KTR) Di perkantoran	Poin	100	37.5	37.5	Sangat Rendah	Persentase ruang Tanpa rokok di bagi jumlah ruang kantor	Sarana ruang khusus yang tidak ada



Grafik 3.13. Perbandingan Realisasi Nilai IKM



b. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

Realisasi target kinerja sasaran Kantor Camat Kota Bangun tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya terjadi sedikit peningkatan. Terdapat 15 (lima belas) indikator yang menjadi target kinerja Kecamatan Kota Bangun pada tahun 2023 ini. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya (tahun 2022) secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.8.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket
			TARGET	Realisasi	Capaian Kinerja	TARGET	Realisasi	Capaian Kinerja	
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	75	71.43	95.24	75	80	114.29	Meningkat
	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	75	76	101.33	75	100	142.86	Meningkat
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	69.7	36.36	52.17	70	15.7	22.43	Menurun
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Persen	30	0	0.00	30	N/A	N/A	-
Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK / Inspektorat yang di tindak lanjuti	Persen	100	0	0.00	100	100	100	-
Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang yang berada di pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di pengguna Barang Milik	Persen	0	0	0.00	100	100	100	-



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

	Daerah								
Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi Kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap
Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN PERTanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap
	Tingkat Kapatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap
Melaksanakan Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	C	Cukup	Baik (B) 60-70	B	100	Menin gkat
Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100	100	100.00	100	100	100	Tetap
Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	0	0.00	1	0	0	-
Terealisasi Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100.00	100	100	100	Tetap
Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	0	n/a	n/a	100	100	100	-
	Persentase realisasi kegiatan Keuangan	Persen	0	n/a	n/a	100	92	92	-
Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko Maksimal 10 Januari	Laporan	0	n / a	n / a	2	1	50	-
Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	0	n / a	n / a	1	0	0	-



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

Melaksanakan tata Kelola Core Values ASN “ BerAKHLAK”	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja	Kegiatan	0	n / a	n / a	4	4	100	-
Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN JP Per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	0	n / a	n / a	100	100	100	-
Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0	n / a	n / a	0.4	0.33	82.5	-
Terlaksananya Koordinasi Konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	0	n / a	n / a	16.5	12.6	76.36	-
Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) Di Kecamatan	Angka	0	n / a	n / a	1	1	100	-
Mewujudkan Desa / Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persentase Desa / Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persen	0	n / a	n / a	45	23	71.89	-
Meningkatnya Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif	Poin	0	n / a	n / a	100	100	100	-
Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Roko (KTR) Di perkantoran	Poin	0	n / a	n / a	100	37.5	37.5	-

Sumber : Kantor Camat Kota Bangun, 2022

Dari tabel realisasi kinerja diatas dapat kita lihat perbandingan pencapaian dari indikator kinerja sasaran pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja ke-1 (Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti)

Realisasi Target kinerja “Indikator Kinerja ke-1” tahun 2023 yaitu 114.29 % dan realisasi tahun sebelumnya juga sebesar 95.24 %, sedangkan perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar 19.05 % pada capaian realisasi kinerja yang bisa dilihat pada grafik dibawah:

2) Indikator Kinerja Ke-2 (Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum)

Realisasi Target kinerja “Indikator Kinerja ke-2” tahun 2023 yaitu 142.86 % dan realisasi tahun sebelumnya juga sebesar 101.33 %, sehingga peningkatan persentase pada capaian realisasi kinerja yang bisa dilihat pada grafik dibawah:

3) Indikator Kinerja Ke-3 (Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa)

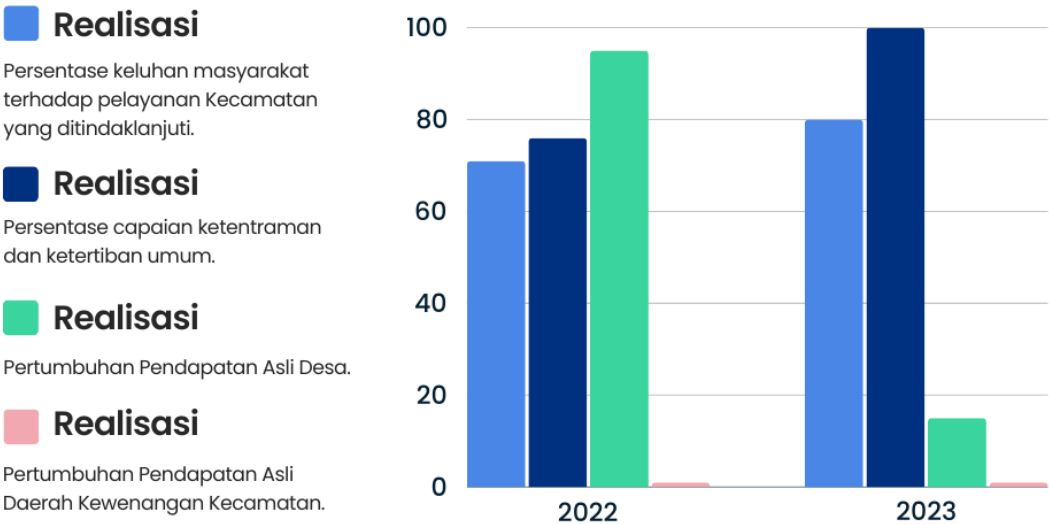


Realisasi Target kinerja “Indikator Kinerja ke-3” tahun 2023 yaitu 22.43 % dan realisasi tahun sebelumnya sebesar 52.17 %, sehingga terjadi penurunan pada capaian realisasi kinerja yang bisa dilihat pada grafik dibawah:

4) Indikator Kinerja Ke-4 (Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan)

Realisasi Target kinerja “Indikator Kinerja ke-4” tahun 2023 yaitu 0% dan realisasi tahun sebelumnya sebesar 0%, sedangkan capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 sebesar 0% sehingga tidak terjadi perubahan pada capaian realisasi kinerja yang bisa dilihat pada grafik dibawah :

KUALITAS DAN JANGKAUAN
PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN

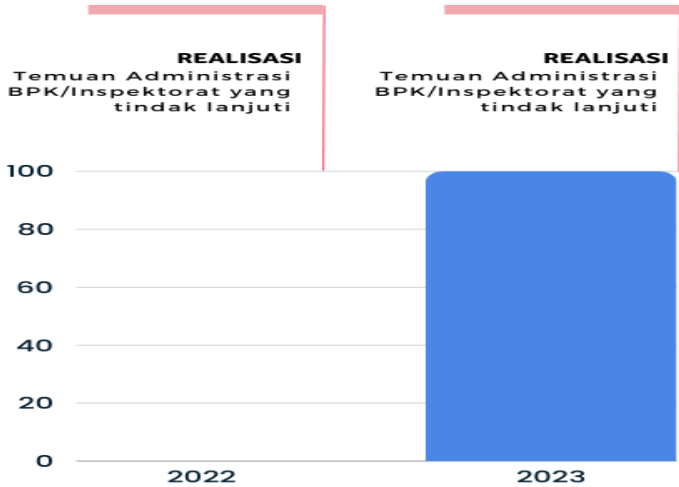


5) Indikator Kinerja Ke-5 (Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja)

Realisasi Target kinerja “Indikator Kinerja ke-5” tahun 2023 yaitu 100% dan realisasi tahun sebelumnya sebesar 0 %, pada capaian realisasi kinerja yang bisa dilihat pada grafik dibawah ini:



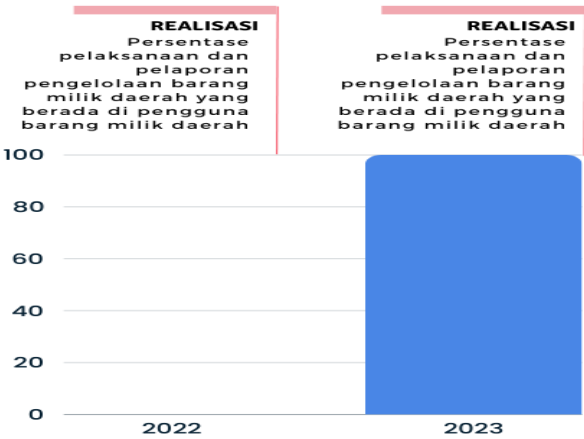
TINDAKLANJUT LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN BPK/INSPEKTORAT DAERAH



6) Indikator Kinerja ke-6 (Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan
Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di pengguna Barang
Milik Daerah)

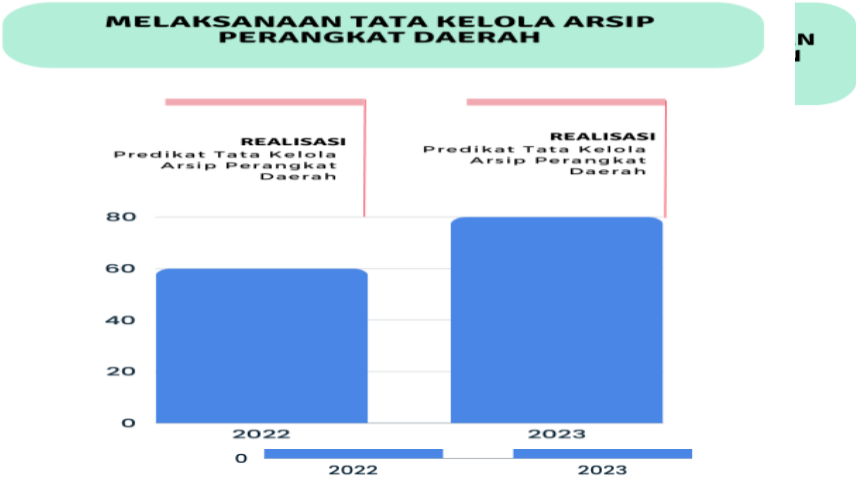
Realisasi Target kinerja “Indikator Kinerja ke-6” tahun 2023 yaitu 100%, sedangkan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 0% sehingga tidak terjadi perubahan pada capaian realisasi kinerja yang bisa dilihat pada grafik dibawah ini:

PENGELOLAAN BARANG YANG BERADA DI
PENGUNA BARANG MILIK DAERAH



7) Indikator Kinerja ke-7 (Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan
Jasa)

Realisasi Target kinerja “Indikator Kinerja ke-7” tahun 2022 yaitu 57,11% dan realisasi tahun sebelumnya pun sama, sedangkan capaian kinerja tahun 2021 dan 2022 sebesar 57,11% sehingga tidak terjadi perubahan pada capaian realisasi kinerja yang bisa dilihat pada grafik dibawah ini:



8) Indikator Kinerja ke-8 (Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023)

Realisasi Target kinerja “Indikator Kinerja ke-8” tahun 2023 yaitu 100% dan realisasi tahun sebelumnya pun sama, sedangkan capaian kinerja tahun sehingga tidak terjadi perubahan pada capaian realisasi kinerja yang bisa dilihat pada grafik dibawah :

9) Indikator Kinerja ke-9 (Tingkat Kapatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023)

Realisasi Target kinerja “Indikator Kinerja ke-9” tahun 2023 yaitu 100% dan realisasi tahun sebelumnya pun sama, sedangkan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100% sehingga tidak terjadi perubahan pada capaian realisasi kinerja yang bisa dilihat pada grafik dibawah ini:



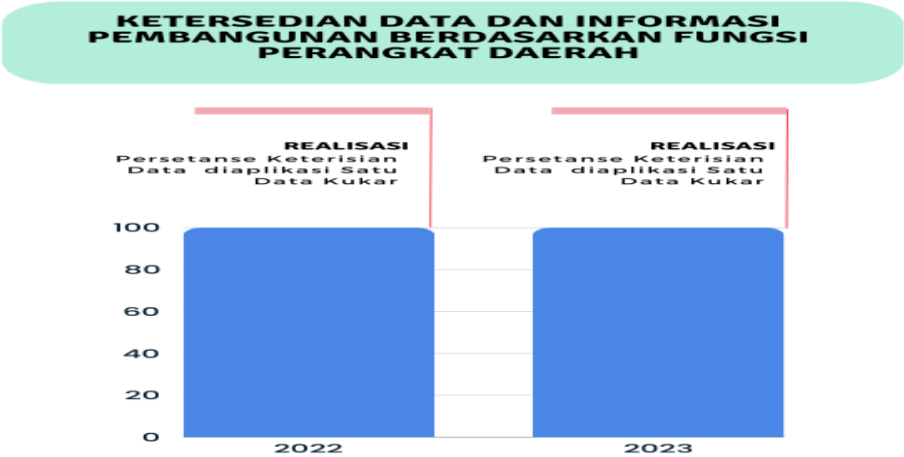
10) Indikator Kinerja ke-10 (Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah)

Realisasi Target kinerja “Indikator Kinerja ke-11” tahun 2023 yaitu B (Baik) dan realisasi tahun sebelumnya adalag C (Cukup), sehingga dilihat dari kategori adanya peningkatan yang bisa dilihat pada grafik dibawah ini:



11) Indikator Kinerja ke-11 (Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar)

Realisasi Target kinerja “Indikator Kinerja ke-11” tahun 2023 yaitu 100 % dan realisasi tahun sebelumnya sebesar 100 %, sehingga Persentase pada capaian realisasi kinerja yang bisa dilihat pada grafik dibawah ini:



12)

Indikator Kinerja ke-12 (Jumlah Inovasi yang telah di lakukan)

Realisasi Target kinerja “Indikator Kinerja ke-12” tahun 2023 yaitu 0 dan realisasi tahun sebelumnya 1, sedangkan capaian kinerja tahun 2022dan 2023 sebesar 100% dan 0 % sehingga capaian realisasi kinerja yang bisa dilihat pada grafik dibawah ini:





13) Indikator Kinerja ke-13 (Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang)

Realisasi Target kinerja “Indikator Kinerja ke-13” tahun 2023 yaitu 100 % dan realisasi tahun sebelumnya sebesar 100 %, sehingga pada capaian realisasi kinerja yang bisa dilihat pada grafik dibawah ini:



14)Indikator Kinerja ke-14 dan ke 15 (Persentase realisasi kegiatan fisik dan realisasi Keuangan)

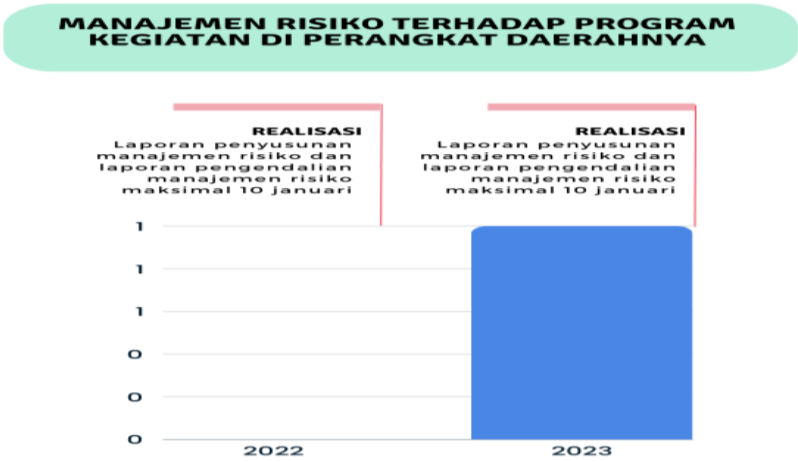
Realisasi Target kinerja “Indikator Kinerja ke-14” dan ke 15 tahun 2023 yaitu Persentase realisasi kegiatan fisik yaitu sebesar 100% dan **Persentase realisasi Keuangan sebesar 92 %**. sedangkan capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 sebesar 100% dan 91,9 % % sehingga pada capaian realisasi kinerja yang bisa dilihat pada grafik dibawah ini:





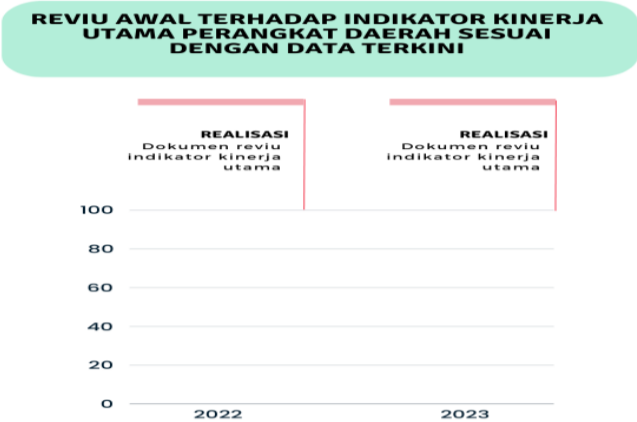
16.Indikator Kinerja ke-16 (Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko Maksimal 10 Januari)

Realisasi Target kinerja “Indikator Kinerja ke-16” tahun 2023 yaitu 50% dan realisasi tahun sebelumnya sebesar n/a, sehingga pada capaian realisasi kinerja yang bisa dilihat pada grafik dibawah ini:



17.Indikator Kinerja ke-17 (Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama)

Realisasi Target kinerja “Indikator Kinerja ke-17” tahun 2023 yaitu 0 % dan realisasi tahun sebelumnya sebesar n/a, sehingga pada capaian realisasi kinerja yang bisa dilihat pada grafik dibawah ini:

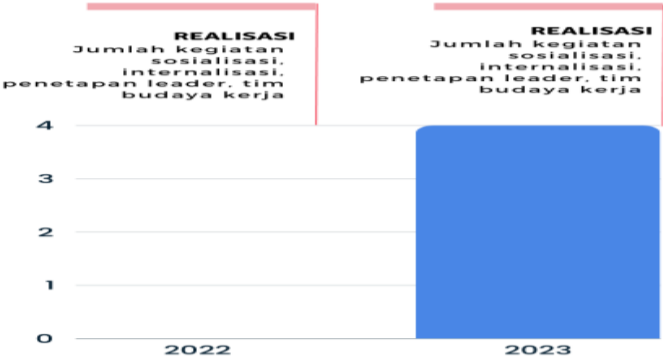


18.Indikator Kinerja ke-18 (tata Kelola Core Values ASN “ BerAKHLAK”)

Realisasi Target kinerja “Indikator Kinerja ke-18” tahun 2023 yaitu 100% dan realisasi tahun sebelumnya sebesar n/a, sehingga pada capaian realisasi kinerja yang bisa dilihat pada grafik dibawah ini:



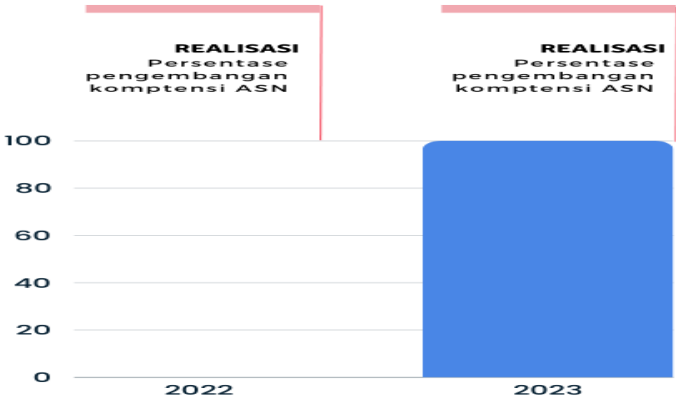
TATA KELOLA CORE VALUES ASN
"BERAKHLAK"



19) Indikator Kinerja ke-19 (Persentase Pengembangan Kompetensi ASN)

Realisasi Target kinerja “Indikator Kinerja ke-19” tahun 2023 yaitu 100% dan realisasi tahun sebelumnya sebesar n/a, sehingga pada capaian realisasi kinerja yang bisa dilihat pada grafik dibawah ini:

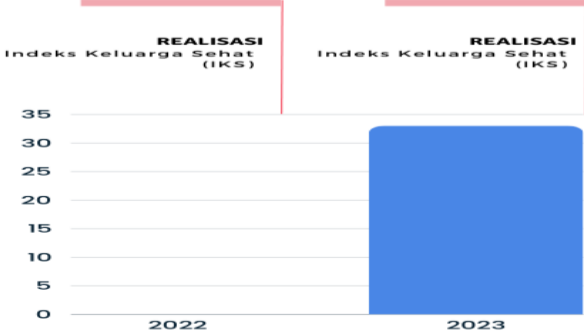
PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN JP PER TAHUN



20) Indikator Kinerja ke-20 (Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Realisasi Target kinerja “Indikator Kinerja ke-20” tahun 2023 yaitu 100% dan realisasi tahun sebelumnya sebesar n/a, sehingga pada capaian realisasi kinerja yang bisa dilihat pada grafik dibawah ini:

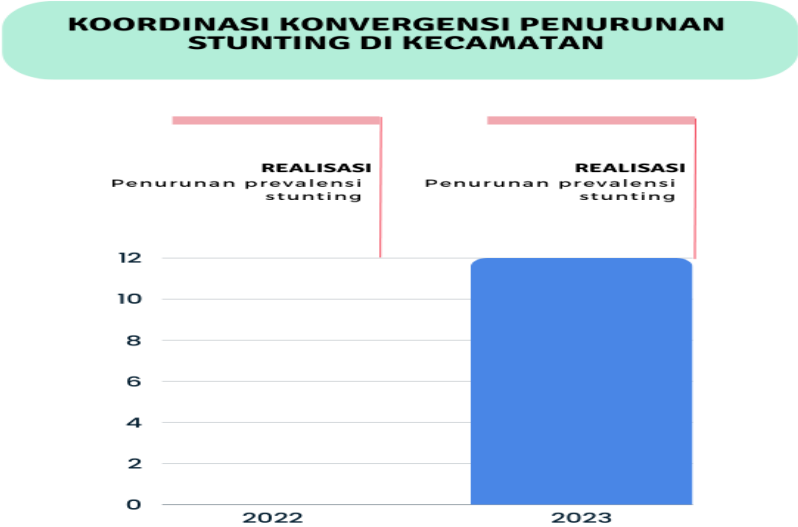
INDEKS KESEHATAN KELUARGA DI KECAMATAN





21)Indikator Kinerja ke-21 (Penurunan Prevalensi stunting)

Realisasi Target kinerja “Indikator Kinerja ke-21” tahun 2023 yaitu 100% dan realisasi tahun sebelumnya sebesar n/a, sehingga pada capaian realisasi kinerja yang bisa dilihat pada grafik dibawah ini:



22)Indikator Kinerja ke-22 (Angka Kematian Ibu (AKI) Di Kecamatan)

Realisasi Target kinerja “Indikator Kinerja ke-22” tahun 2023 yaitu 100% dan realisasi tahun sebelumnya sebesar n/a, sehingga pada capaian realisasi kinerja yang bisa dilihat pada grafik dibawah ini:

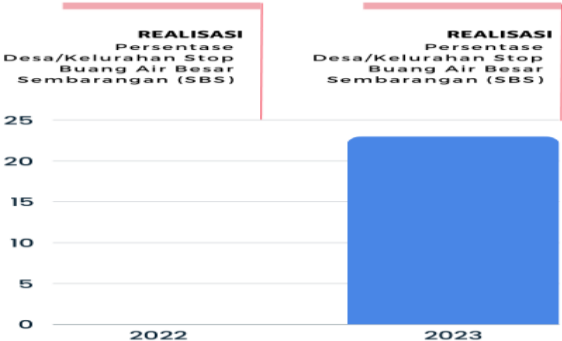


23)Indikator Kinerja ke-23 (Persentase Desa / Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS))

Realisasi Target kinerja “Indikator Kinerja ke-23” tahun 2023 yaitu 100% dan realisasi tahun sebelumnya sebesar n/a, sehingga pada capaian realisasi kinerja yang bisa dilihat pada grafik dibawah ini:



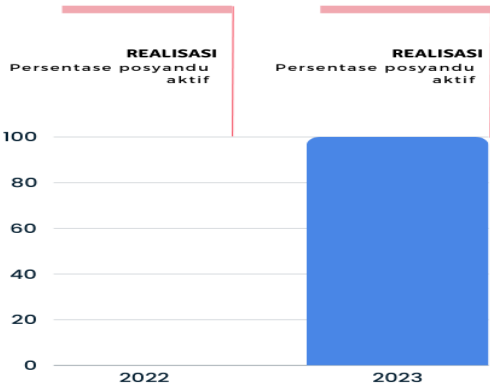
DESA/KELURAHAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)



24)Indikator Kinerja ke-24 (Persentase Posyandu Aktif)

Realisasi Target kinerja “Indikator Kinerja ke-24” tahun 2023 yaitu 100% dan realisasi tahun sebelumnya sebesar n/a, sehingga pada capaian realisasi kinerja yang bisa dilihat pada grafik dibawah ini:

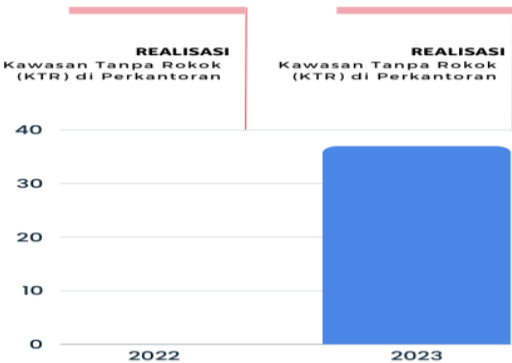
MENINGKATNYA POSYANDU AKTIF



25)Indikator Kinerja ke-25 (Kawasan Tanpa Roko (KTR) Di perkantoran)

Realisasi Target kinerja “Indikator Kinerja ke-25” tahun 2023 yaitu 100% dan realisasi tahun sebelumnya sebesar n/a, sehingga pada capaian realisasi kinerja yang bisa dilihat pada grafik dibawah ini:

KAWASAN TANPA ROKOK DI PERKANTORAN PEMERINTAH





3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam pelaksanaan perjanjian kinerja antara kepala perangkat daerah dengan Bupati tentunya ada faktor pendukung dan penghambat yang menyebabkan tidak terealisasinya target sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sehingga menyebabkan menurunnya kinerja perangkat daerah yang ada. Pada tahun 2023 ada beberapa faktor pendukung dan penghambat sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Tahun 2023			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
			TARGET	Realisasi	Capaian Kinerja		
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	75	80	114.29	Adanya SOP Pelayanan yang di jalankan	Sarana dan prasarana yang belum optimal
	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	75	100	142.86	Adanya SOP Pelayanan yang di jalankan	Kurangnya staf pendukung yang ada di bagian trantib
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	70	15.7	22.43	Adanya BUM Des yang aktif	Belum Optimalnya peran BUM desa dalam menggali PADes masing masing
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Persen	30	N/A	N/A	Adanya UPT Dispenda	Tidak adanya kewenangan kecamatan dalam pajak dan retribusi
Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK / Inspektorat yang di tindak lanjuti	Persen	100	100	100	Adanya SOP yang di jalankan	Sarana dan prasarana yang belum optimal
Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang yang berada di pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100	tersedianya data pada aplikasi BMD	Aplikasi yang masih kadang tidak stabil
Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi Kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	100	100	Kelengkapan Data Anggaran (DPA)	Perubahan Akun, Server SIRUP yang terjadi gangguan dan kondisi jaringan internet kurang stabil sehingga menyulitkan proses entry oleh petugas
Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN PERTanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100	Pelaksanaan Pelaporan dilaksanakan tepat waktu	-



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kapatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100	Pelaksanaan Pelaporan dilaksanakan tepat waktu	-
Melaksanakan Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	B	100	Telah bimtek penatausahaan arsip dinamis yang juga dilengkapi dengan praktek penataan arsip	Lemahnya SDM yang mengerti pengelolaan arsip
Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100	100	100	Pelaporan Menggunakan Aplikasi yang memudahkan petugas entry dan melaporkan hasil kegiatan dengan valid dan tepat waktu	Gangguan Jaringan Internet dan Komunikasi serta Kelengkapan Data Yang Diminta Tidak Dilaporkan Tepat Waktu Oleh Pejabat terkait
Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	0	0		Tidak ada inovasi yang diusulkan oleh Kecamatan Kota Bangun
Terealisasi Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100	Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Tahapan	SPD yang lambat tersedia sehingga kegiatan sedikit terhambat
Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	100	100	Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Tahapan	Kondisi alam yang masih menjadi penghambat realisasi kegiatan
	Persentase realisasi kegiatan Keuangan	Persen	100	92	92	Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Tahapan	Jaringan aplikasi keuangan yang tidak stabil
Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2	1	50	telah dilakukannya pendampingan penyusunan manajemen risiko	SDM yang memahami masih kurang
Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	0	0	-	belum adanya pendampingan review IKU pada PD
Melaksanakan tata Kelola Core Values ASN “ BerAKHLAK”	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja	Kegiatan	4	4	100	telah dilakukannya pendampingan Core Value ASN	kurangnya anggaran yang dialokasikan
Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN JP Per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	100	100	telah dilakukannya pendampingan manajemen Kinerja	kurangnya anggaran yang dialokasikan
Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0.4	0.33	82.5	-	-
Terlaksananya Koordinasi Konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	16.5	12.6	76.36	-	-
Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) Di Kecamatan	Angka	1	1	100	-	-
Mewujudkan Desa / Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persentase Desa / Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persen	45	23	71.89	-	-
Meningkatnya Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif	Poin	100	100	100	-	-
Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di	Kawasan Tanpa Roko (KTR) Di perkantoran	Poin	100	37.5	37.5	-	kurangnya anggaran yang dialokasikan



perkantoran Pemerintah							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Kantor Camat Kota Bangun, 2023

4. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran dengan kategori penilaian yaitu :

- Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran dan rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Kecamatan Kota Bangun tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11.
Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Realisasi	Ket.
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,806,306,938	8,936,637,133	82.70	Efisien
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	38,261,863,564	6,803,739,678	96.19	Efisien
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4,801,710,420	4,076,996,750	84.91	Efisien
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	467,086,000	232,065,000	49.68	Tidak Efisien
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	65,000,000	-	0.00	Tidak Efisien

Sumber : Kantor Camat Kota Bangun, 2023

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 5 Program menunjukkan 3 (Tiga) program tercapai secara efisien karena sasaran dapat dicapai sebesar 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran, selanjutnya



terdapat 2 (dua) sasaran tercapai tidak efisien, ini karena kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Kota Bangun tidak mencapai 100%, atau persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran yang ada.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12.
Analisis Program Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023

Program	Indikator	Target	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67.01	67	100	Ketersediaan Anggaran Yang Memadai, Ketersediaan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas Dan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Yang Memadai Serta Kebijakan Dan Regulasi Pusat /Daerah Yang Mendukung	Ketersediaan Anggaran Yang Terbatas , Ketersediaan Sumberdaya Manusia Yang Kurang Berkualitas Dan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Yang Tidak Memadai Serta Kebijakan Dan Regulasi Pusat /Daerah Yang Mendukung
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	100	100	sosialisasi melalui media sosial	saran dan prasarana yang kurang memadai dan belum optimalnya aplikasi pelayanan
	Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan	54.79	55	100	data rencana pembangunan yang cukup	alokasi anggaran yang masih terbatas
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif	67	71	106	Dukungan dari pemerintahan Desa yang selalu proaktif dalam memberdayakan lembaga Desa	belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dalam pemberdayaan lembaga masyarakat



Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60	60	100	kegiatan kegiatan yang melibatkan Forkopimcam	belum optimalnya pelaksanaan Forkopimcam
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	72	45	62.5	Pendampingan kepada Pemerintahan Desa yang telah dilakukan	kurang nya alokasi anggaran dalam pemberian reward kepada pemerintahan Desa

Sumber : Kantor Camat Kota Bangun, 2023

Berdasarkan tabel diatas seluruh program penunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kota Bangun tahun 2023 mencapai target yang telah ditetapkan, berikut penjelasan faktor-faktor yang menunjang keberhasilan dan kendala yang dihadapi adalah

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota tahun 2023 yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target mendapat nilai (67.01) dan realisasi target di tahun 2023 mendapat penilaian sebesar 67. Target kinerja yang sudah ditentukan tercapai, dengan Capaian kinerja sebesar 100%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu pejabat yang berkewajiban memberikan laporan tidak tepat waktu dalam pengisian dan pelaporannya.

Dalam mempertahankan realisasi kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Kota Bangun yaitu akan berkoordinasi dan berkonsultasi ke Inspektorat wilayah Kabupaten Kutai kartanegara dan Bagian Organisasi dan tatalaksana Sekretariat Daerah tentang tata cara serta kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi agar tingkat kepatuhan dalam pelaporan sesuai batas waktu yang ditetapkan.

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Indikator kinerja Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik tahun 2023 yaitu Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP dengan target kinerja sebesar 100%. Ditahun 2023 target kinerja program tercapai sesuai target, ini dikarenakan pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kota Bangun semuanya sudah sesuai SOP dan standar pelayanan publik. Hasil ini didapat dari hasil survey yang diadakan kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan baik itu perijinan atau pun non perijinan. Hasil survey diolah sesuai standar perhitungan Indeks Kepuasan masyarakat dengan memenuhi berbagai kriteria penilaian.



Kendala yang dihadapi selama tahun 2023 yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai dan belum optimalnya aplikasi pelayanan untuk manajemen dan kelengkapan berkas administrasi dalam pengurusan perijinan dan non perijinan.

Berikut jumlah pelayanan yang telah dilaksanakan oleh bagian pelayanan Kantor Camat Kota Bangun selama tahun 2023 yaitu

Tabel 3.13.
LAPORAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
KECAMATAN KOTA BANGUN
BULAN : JANUARI S/D DESEMBER 2023

No.	Nama	Jenis Pelayanan	Jumlah Kegiatan Pelayanan Untuk Perbulan												Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okto	Nov	Des	
1	Seksi Pelayanan Umum	Pengantar SKCK	12	10	3	3	15	15	21	15	2	2	3	20	121
		SKTM	-	1	-	-	1	1		22	2	2	2	-	31
		Suket Domisili	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	4
		Surat Keterangan Ahli Waris	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3
		Surat Keterangan Kematian	2	3	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	13
		Surat Dispensasi Nikah	5	7	-	-	-	-	7	7	1	3	3	12	45
		Surat Lain-lain	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Pengesahan Foto Copy KTP	19	17	-	-	-	6	20	9	18	15	33	34	171
		Pengesahan Foto Copy KK	8	12	-	-	-	9	16	5	4	3	6	13	76
		Pengesahan Foto Copy AK-1	35	19	10	10	11	11	34	20	20	39	21	20	250
		Total Perbulan	81	71	13	13	27	42	98	80	48	73	69	100	715
2	Seksi Pemerintahan	SKPT	2	3	5	3	2	6	2	7	3	2	10	6	51
		Perekaman KTP-EI	-	-	-	-	14	35	75	-	-	-	-	-	124
		Pembuatan KK	25	35	12	21	11	15	55	55	25	31	25	41	351
		Penerbitan Surat Keterangan Perekaman KTP-EL	55	21	-	-	10	25	65	179	63	31	32	50	531
		Pembuatan Surat Pindah	-	15	4	2	7	5	5	12	-	-	25	23	98
		Total Perbulan	82	74	21	26	44	86	202	253	91	64	92	120	1155
3	Seksi Pemberday	Pembuatan Izin Membangun (IMB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0



	aan Masy arakat Desa	Penerbitan Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Penerbitan Rekomendasi Pokmas	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	2	7	
		Izin Usaha Mikro Kecil (UMK)	-	-	-	-	-	-	-	5	21	27	33	7	93
Total Perbulan			0	0	4	1	0	0	0	5	21	27	33	9	100
4	Seksi Tranti b	Penerbitan Izin Gangguan (HO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Penerbitan Izin Keramaian	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3	
Total Perbulan			0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	
5	Seksi Kesej ahtera an Sosial	Penerbitan AK.1	15	23	10	10	-	5	15	19	20	24	25	21	187
		Penerbitan Rekomendasi Pokmas	-	-	-	3	-	-	-	-	2	11	-	16	
		Pembuatan Surat dispensi nikah	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	
		Pembuatan AK 1	-	-	-	-	11	5	-	-	-	-	-	16	
Total Perbulan			15	23	10	13	11	13	15	19	20	26	36	21	222

Sumber : Kantor Camat Kota Bangun, 2023

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan tahun 2023 yaitu Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif dengan target sebesar 67 %. Target kinerja pada tahun ini tercapai sebesar 71% dikarenakan seluruh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang ada seperti PKK dan beberapa lembaga lainnya, semuanya aktif dalam melaksanakan kegiatan di tahun 2023.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK antara lain lomba-lomba, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh tim penggerak PKK yang ada di Desa. Dalam pelaksanaannya hambatan dan kendala pun ada yaitu kurangnya respon dan antusias desa untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat yang diadakan oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan Kota Bangun dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Kartanegara.

4) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator kinerja Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa ditahun 2023 yaitu Persentase Desa Yang Memiliki Predikat



Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik dengan target 72 %. Target kinerja tercapai hanya 45 %

Tabel 3.14.
Daftar Realisasi APBDes Tahun 2023
Per 30 Desember 2023

No	Desa	APBDES TA 2023 (ADD, DD, BHPRD, BKKD RT, Bankeu Provinsi, PADes)		% Realisasi	Predikat
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Kota Bangun Ulu	4,967,998,800	4,742,791,886	95.47	Baik
2	Loleng	5,404,092,200	5,100,596,852	94.38	Baik
3	Liang	3,786,758,200	3,663,822,354	96.75	Baik
4	Kota Bangun Ilir	3,966,263,200	3,748,260,251	94.50	Baik
5	Pela	3,138,631,853	3,063,064,810	97.59	Baik
6	Muhuran	3,064,509,200	2,979,270,394	97.22	Baik
7	Kota Bangun Seberang	4,176,398,000	3,949,339,919	94.56	Baik
8	Kedang Murung	4,879,806,460	4,347,281,325	89.09	Baik
9	Liang Ulu	4,817,346,881	4,623,609,838	95.98	Baik
10	Sebelimbingan	4,208,656,800	4,124,189,540	97.99	Baik
11	Sangkuliman	3,128,850,200	3,123,036,379	99.81	Baik
Jumlah		45,539,311,794	43,465,263,548	95.45	

Sumber : Kantor Camat Kota Bangun, 2023

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ada pada Kecamatan Kota Bangun dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar **92,00%**, dari pagu sebesar Rp. **54.401.966.922,00** dan terealisasi sebesar Rp. **50.049.438.561,00** yang terdiri dari 5 (lima) program 12 (dua belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 realisasi anggaran sebesar Rp. 22,547,389,944,00 atau sebesar 91,89 %. Adapun realisasi anggaran dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut dibawah ini :



Tabel 3.15.
Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan Tahun 2023
Kecamatan Kota Bangun

Program	Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Pagu anggaran	Realisasi	Capaian	Sisa Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75,000,000			75,000,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,967,376	1,540,00	7,34	19,427,376
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,535,121,420	5,196,749,998	93,89	338,371,422
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11,000,000			11,000,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	38,390,000	32,100,00	83,62	6,290,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	41,927,864	19,790,00	47,20	22,137,864



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	62,000,000	60,512,00	97,60	1,488,000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0		97,60	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000			5,000,000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	306,535,264	303,800,00	99,11	2,735,264
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20,500,000			20,500,000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65,366,816	62,956,00	96,31	2,410,816
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70,000,000	37,475,50	53,54	32,524,500
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,000,000			20,000,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500,000,000	355,161,675	71,03	144,838,325
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100,000,000	70,350,00	70,35	29,650,000
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	200,000,000	198,829,326	99,41	1,170,674
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,285,560,000	1,171,799,999	91,15	113,760,001
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0		91,15	0



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000	3,000,00	5	3,000,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,031,960,000	602,060,032	58,34	429,899,968
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	972,325,396	537,853,321	55,32	434,472,075
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5,000,000			5,000,000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	428,654,837	282,659,282	65,94	145,995,555
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,997,965			4,997,965
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0			0
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	440,049,000			440,049,000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	37,821,814,564	36,803,739,678	97,31	1,018,074,886



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

		dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	55,020,000	23,549,50	42,80	31,470,500
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4,746,690,420	4,053,447,25	85,40	693,243,170
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	457,086,000	232,065,00	50,77	225,021,000
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10,000,000			10,000,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	65,000,000			65,000,000

Kecamatan Kota Bangun

Sumber : Kantor Camat Kota Bangun, 2023

Sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 realisasi penyerapan angggaran Kecamatan Kota Bangun sebesar **91,89%**, jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **92,00 %** terjadi kenaikan sebesar **0,52%**. Adapun realisasi anggaran 2022 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut dibawah ini :



Tabel 3.16.
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022
Kecamatan Kota Bangun

Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaian Realisasi	Sisa Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,449,291,836			8,449,291,836
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,970,705	15,408,000	70.13	6,562,705
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11,000,000	4,450,000	40.45	6,550,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,970,705	10,958,000	99.88	12,705
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,000,363,897	3,420,000	0.07	4,996,943,897
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,994,363,897		0	4,994,363,897
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6,000,000	3,420,000	57	2,580,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14,400,000	-	0.0	14,400,000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14,400,000	-	0.0	14,400,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	481,172,712	291,065,750	60.5	190,106,962
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000	-	0	5,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52,878,712	52,847,100	99.94	31,612
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70,000,000	40,000,000	57.14	30,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55,000,000	35,000,000	63.64	20,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235,000,000	124,968,050	53.18	110,031,950
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	63,294,000	38,250,600	60.43	25,043,400
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,276,666,166	168,231,129	13.18	1,108,435,037
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	302,531,129	167,031,129	55.21	135,500,000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	974,135,037	1,200,000	0.12	972,935,037
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,471,628,356	1,017,641,447	69.15	453,986,909



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000	3,000,000	50	3,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	882,331,988	617,906,241	70.03	264,425,747
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	583,296,368	396,735,206	68.02	186,561,162
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183,090,000	141,241,115	77.14	41,848,885
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7,700,000	4,060,800	52.74	3,639,200
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175,390,000	137,180,315	78.21	38,209,685
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15,455,147,326		0	15,455,147,326
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	10,000,000	-	0	10,000,000
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	10,000,000	-	0	10,000,000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	15,445,147,326	15,311,927,253	99.13746324	133,220,073
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	10,000,000	-	0	10,000,000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15,435,147,326	15,311,927,253	99.20	123,220,073
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	433,248,436		0	433,248,436
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	433,248,436	313,669,800	72.39952275	119,578,636
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12,103,800	12,103,800	100	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	421,144,636	301,566,000	71.61	119,578,636
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	180,000,000		0	180,000,000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	180,000,000	-	0	180,000,000
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	175,000,000	-	0	175,000,000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5,000,000	-	0	5,000,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18,654,837		0	18,654,837



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2023

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18,654,837	3,540,000	18.97631161	15,114,837
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15,000,000	-	0	15,000,000
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3,654,837	3,540,000	96.86	114,837
	24,536,342,435	22,547,389,944	91.89	24,536,342,435

Sumber : Kantor Camat Kota Bangun, 2023



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kota Bangun tahun 2023 merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah serta seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dan dapat sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Kota Bangun pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun kedua dari Renstra Kecamatan Kota Bangun Tahun 2021-2026. Kecamatan Kota Bangun telah dapat merealisasikan pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun Tahun 2023 dapat tercapai melebihi target yang sudah ada, hasil capaian per-indikator sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Tujuan

- a. Capaian Kinerja nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan diperoleh sebesar 111.35 % (Sangat Tinggi) dari target Nilai 75 dan diperoleh nilai **83,51**.

2. Capaian Indikator Sasaran

- a. Capaian kinerja Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti memperoleh nilai 142.86 % (Sangat Tinggi)
- b. Capaian kinerja Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar 133.33 (Sangat Tinggi)
- c. Capaian kinerja Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa sebesar 22.43 % (Sangat Rendah)
- d. Capaian kinerja Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan sebesar 0% (Sangat Rendah)
- e. Capaian kinerja Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja sebesar 100% (Sangat Tinggi)
- f. Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di pengguna Barang Milik Daerah sebesar 100% (Sangat Tinggi)
- g. Capaian kinerja Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa



sebesar 100% (Sangat Tinggi)

- h. Capaian kinerja Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN PErtanggal 31 Maret 2023 sebesar 100% (Sangat Tinggi)
- i. Tingkat Kapatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023 sebesar 95% (Sangat Tinggi)
- j. Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah sebesar B (Baik)
- k. Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar sebesar 100% (Sangat Tinggi)
- l. Inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah. sebesar 0% (Sangat Rendah)
- m. Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang sebesar 100% (Sangat Tinggi)
- n. Persentase realisasi kegiatan fisik sebesar 100% (Sangat Tinggi)
- o. Persentase realisasi kegiatan Keuangan sebesar 92 % (Sangat Tinggi)
- p. Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko Maksimal 10 Januari sebesar 50 % (Sangat Rendah)
- q. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama 0 % (Sangat Rendah)
- r. Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja sebesar 100 % (Sangat Tinggi)
- s. Persentase Pengembangan Kompetensi ASN sebesar 100 % (Sangat Tinggi)
- t. Indeks Keluarga Sehat (IKS) sebesar 82.5 % (Tinggi)
- u. Penurunan Prevalensi stunting sebesar 76,36 % (Tinggi)
- v. Angka Kematian Ibu (AKI) Di Kecamatan sebesar 100 % (Sangat Tinggi)
- w. Persentase Desa / Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) sebesar 71,89 % (Sedang)
- x. Persentase Posyandu Aktif sebesar 100 % (Sangat Tinggi)
- y. Kawasan Tanpa Roko (KTR) Di perkantoran sebesar 37,5 % (Sangat Rendah)

Capaian kinerja Realisasi Anggaran tahun 2023 pun meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 capaian kinerja realisasi anggaran Kecamatan Kota Bangun sebesar 91,89% atau terjadi peningkatan kinerja sebesar 0,52%.

B. Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2023, maka rencana perbaikan kedepan dalam



memperbaiki kinerja yang belum tercapai atau mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Kota Bangun akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Inspektorat wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait pemenuhan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam penilaian SAKIP,
- 2) Terkait predikat pengelolaan arsip perangkat daerah Kecamatan Kota Bangun yang tidak memenuhi target maka akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara terkait tata cara pengelolaan arsip dengan baik dan benar. Dimana selama ini Kecamatan Kota Bangun banyak mengalami kendala dalam pengelolaan arsip perangkat daerah.

Hambatan yang dialami oleh Kecamatan Kota Bangun dalam mengelola arsip yaitu karena kurangnya sumber daya manusia, tidak ada arsiparis yang secara khusus mengelola arsip, belum adanya pelatihan tentang kearsipan yang diberikan kepada aparatur kecamatan, serta sarana dan prasarana yang belum tersedia secara lengkap dalam mengelola arsip.

- 3) Akan lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap ASN yang belum melaporkan harta kekayaan di aplikasi LHKASN sebelum batas waktu yang ditentukan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kota Bangun Tahun 2023, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Kota Bangun, 15 Februari 2023

